



DISHUB
KOTA DUMAI
www.dishub.dumai.kota.go.id



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI TAHUN 2025



#BerAKHLAK
Berakhlak, melayani, berprestasi, berkeadilan, berkeadilan, berkeadilan

#bangga
melayani
bangsa



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PERHUBUNGAN

JL. H.R. Soebrantas No. 135 Dumai Telp / Fax (0765) 31152
D U M A I

SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN DATA LAPORAN LKIP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAID EFFENDI, SE., M.M
NIP : 19800201 200604 1 013
Pangkat / Gol : Pembina Tk. I / IV.b
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Organisasi : Dinas Perhubungan Kota Dumai

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang dikirim melalui *link* sesuai dengan yang ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan benar berdasarkan data *un audit* per tanggal 31 Desember 2025 yang bersumber pada :

1. Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021-2026
2. DPPA Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun Anggaran 2025
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2025
4. Laporan SPJ Fungsional pada sistem SIPD

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dumai, 12 Januari 2026

Kepala Dinas Perhubungan,



SAID EFFENDI, SE., M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19800201 200604 1 013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Isu Strategis.....	6
1.5 Cascading Kinerja.....	7
1.6 Peta Proses Bisnis.....	9
1.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN	
2.1 Rencana Strategis.....	11
2.2 Tujuan dan Sasaran.....	12
2.3 Kebijakan, Strategi dan Program.....	14
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI	
A. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai.....	17
3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	19
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	27
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra.....	33
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional.....	35
3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi.....	35
3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	40
3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	63
3.8 Prestasi dan Penghargaan.....	65
B. Realisasi Anggaran.....	65
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Langkah Perbaikan/Saran.....	70

DAFTAR LAMPIRAN LAPORAN KINERJA (LKIP) DINAS PERHUBUNGAN

1. Matrik Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021-2026
2. Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Dumai
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 beserta lampiran
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 beserta Lampiran Perubahan
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2025
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2025

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025.....	xi
Tabel 2	Program Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025.....	xi
Tabel 3	Perubahan Program Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai	xii
Tabel 4	Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2025.....	xii
Tabel 5	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025	xiv
Tabel 6	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025	xv
Tabel I.1	ASN DISHUB berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2025	5
Tabel I.2	PNS DISHUB berdasarkan Jenjang Jabatan Tahun 2025	5
Tabel I.3	ASN DISHUB berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2025...	6
Tabel I.4	Rincian Hasil Penilaian Mandiri oleh Perangkat Daerah dan APIP	9
Tabel I.5	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.....	10
Tabel II.1	Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021-2026.....	13
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025.	14
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025	15
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025.....	15
Tabel II.5	Program Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai.....	16
Tabel II.6	Program Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Dumai	16
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	18
Tabel III.2	Atribut Capaian Indikator Kinerja	19
Tabel III.3	Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran dan IKU Tahun 2025	20
Tabel III.4	Data Kendaraan Wajib Uji dan yang Lulus Uji Tahun 2025	21
Tabel III.5	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus Tahun 2025.....	23
Tabel III.6	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Jalan Tahun 2025	25
Tabel III.7	Jumlah Kendaraan di Kota Dumai Tahun 2025	26
Tabel III.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	33
Tabel III.9	Perbandingan Realisasi sampai dengan Akhir Periode Renstra	35
Tabel III.10	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	40

Tabel III.11	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	63
Tabel III.12	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	63
Tabel III.13	Prestasi dan Penghargaan Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025	65
Tabel III.14	Ringkasan Anggaran dan Realisasi Tahun 2025	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Dumai.....	4
Gambar I. 2	Cascading Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai	7
Gambar I. 3	Peta Proses Bisnis Dinas Perhubungan Kota Dumai	8
Gambar II. 1	Misi ke - 3 Kota Dumai	12
Gambar III.1	Pembangunan Prasarana Jalan (Pos Retribusi dan Pedestrian)	48
Gambar III.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan (Rambu, Papan Nama Jalan, RPPJ) Tahun 2025.....	51
Gambar III.3	Penyediaan Perlengkapan Jalan (Marka Jalan, Marka Parkir, Marka Sepeda, Marka Pita Penggaduh, ZOSS)	52
Gambar III.4	Penyediaan Perlengkapan Jalan (Alat Penerangan Jalan).....	53
Gambar III.5	Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Juru Parkir Tepi Jalan Umum.....	54
Gambar III.6	Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor	55
Gambar III.7	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PKB	56
Gambar III.8	Kegiatan Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas.....	57
Gambar III.9	Pembangunan ZOSS	58
Gambar III.10	Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	59
Gambar III.11	Kegiatan Penilaian Andalalin Kota Dumai	61
Gambar III.12	Kegiatan Pos Pengamanan Natal dan Tahun Baru	62

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai ini merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada PermenPAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan Dinas Perhubungan dalam mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya sesuai kewenangan dibidang urusan perhubungan, efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai yang digunakan sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Dinas Perhubungan

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Dinas Perhubungan Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.



Dumai, 12 Januari 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

SAID EFFENDI, SE., M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19800201 200604 1 013

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan Kota Dumai merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang mana Dinas Perhubungan Kota Dumai mempunyai tugas membantu Walikota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, maka sebagai unsur teknis, Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Perhubungan Kota Dumai menjalankan fungsi:

1. Perumusan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
4. Evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan; dan
6. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait lingkup fungsinya.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Dinas Perhubungan Kota Dumai melaksanakan **MISI yang ke 3** Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas“** dan **SASARAN yang ke 1** yang merupakan Tujuan Strategis Organisasi yaitu **“Mewujudkan Infrastruktur dan Ruang Kota Dumai yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan“**

Secara umum Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Dumai 2021 - 2026 telah menetapkan 1 (satu) Tujuan dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 - 2026 adalah dengan ditetapkan 2 (dua) Program, 15 (lima belas) Kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025 antara lain:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
 - 1.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- 1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.4.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 1.4.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.7.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.7.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- 2.1 Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - 2.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- 2.2 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.2.1 Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.2.2 Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.2.3 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
 - 2.2.4 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

- 2.3 Kegiatan Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - 2.3.1 Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2.3.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2.4 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 2.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 2.4.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor
- 2.5 Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.5.1 Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.5.2 Sub Kegiatan Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
 - 2.5.3 Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.5.4 Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.5.5 Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- 2.6 Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.6.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
- 2.7 Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.7.1 Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
 - 2.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.8 Kegiatan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.8.1 Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai pada Tahun 2025 yakni sebagai berikut:

Tabel I
Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai pada Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	76,5%
		Persentase Prasarana Transportasi	78%
		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	75%
		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	75%
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	1.198,23 km : 98.424 unit
2	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP	BB

Sumber: Perjanjian Kinerja Dishub Kota Dumai, 2025

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp 74.760.450.556,- (*Tujuh Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) untuk melaksanakan 2 (dua) Program Kerja antara lain :

Tabel 2
Program Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 31.048.492.790,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 43.711.957.766,-	APBD
J U M L A H		Rp 74.760.450.556,-	APBD

Sumber: DPA DISHUB Kota Dumai, 2025

Seiring dengan Perubahan Anggaran pada APBD Kota Dumai Tahun 2024, maka pada 25 September 2025 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025 dengan Perubahan Program Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3
Perubahan Program Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 30.876.135.616,98	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 66.163.844.490,28	APBD
J U M L A H		Rp 97.039.980.107,26	APBD

Sumber: DPPA Dishub Kota Dumai, 2025

Dinas Perhubungan Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2025

No	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2025	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan Sasaran: Terselenggara anyu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	76,5%	76,5%	100%	✓			
		Persentase Prasarana Transportasi	78%	78%	100%	✓			
		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	75%	52%	69%			✓	
		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	75%	75%	100%	✓			
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	1.198,23 km : 98.424 unit	1.198,23 km : 97.239 unit	98%	✓			

Sumber: Dishub Kota Dumai, 2025

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut diatas, menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai selama tahun 2025 termasuk kategori “Sangat Berhasil” untuk 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yakni (1) Persentase Prasarana Transporasi, (2) Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan (3) Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan serta Kategori “Cukup Berhasil” untuk Indikator Kinerja Persentasi Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Perhubungan Kota Dumai pada tahun 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp 99.924.976.667,26 (*Sembilan Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Koma Dua Puluh Enam Rupiah*) bersumber dari APBD Kota Dumai. Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp 67.050.762.717,00 (*Enam Puluh Tujuh Miliar Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah*) dan BELANJA MODAL sebesar Rp 32.874.213.950,26 (*Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Koma Dua Puluh Enam Rupiah*)

1. Belanja Operasi	:	Rp	67.050.762.717,00
2. Belanja Modal	:	Rp	32.874.213.950,26
J u m l a h	:	Rp	99.924.976.667,26

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Tujuan: Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	76,5%	76,5%	100%			
Sasaran: Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Prasarana Transportasi	78%	78%	100%			
	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	75%	52%	69%			
	Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	75%	75%	100%			
	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	1.198,23 km: 98.424 unit	1.198,23 km : 97.239 unit	98%			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	100%	100%	100%	33.761.132.176,98	28.037.994.628,98	83,05%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	95%	100%	105%	66.163.844.490,28	49.062.494.048,64	74,15%

Sumber data : Dishub Kota Dumai Tahun 2025

Sebagaimana uraian tersebut diatas, Dinas Perhubungan Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2025. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya DISHUB Kota Dumai Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi		Ket
1	2	3	4	5	6		7
1.	Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	100%	71,28%	1,40	Sangat Efisien	-
		Persentase Prasarana Transportasi	100%	91,95	1,09	Sangat Efisien	-
		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	69%	80,63	0,86	Efisien	-
	Sasaran : Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100%	50,61	1,98	Sangat Efisien	-
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	98%	62,05	1.58	Sangat Efisien	-

- a. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Prasarana Transportasi tingkat efisiensinya adalah 1,40 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2025 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2025 (71,28%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori Sangat Efisien;
- b. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang adalah 0,86 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2025 (69%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2025 (80,63%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori Efisien;
- c. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat efisiensinya adalah 1,98 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2025 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2025 (50,61%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori Sangat Efisien;
- d. Pada Indikator Kinerja Utama Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan tingkat efisiensinya adalah 1.58 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2025 (98%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (62,05%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori Sangat Efisien;

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau persentase.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E/Noreg Peraturan Daerah Provinsi Riau (8.09.A/2024));
5. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 17 Seri D);

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Perhubungan Kota Dumai dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D) dan dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Perhubungan Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
4. Evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan; dan
6. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait lingkup fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Dumai terdiri dari :

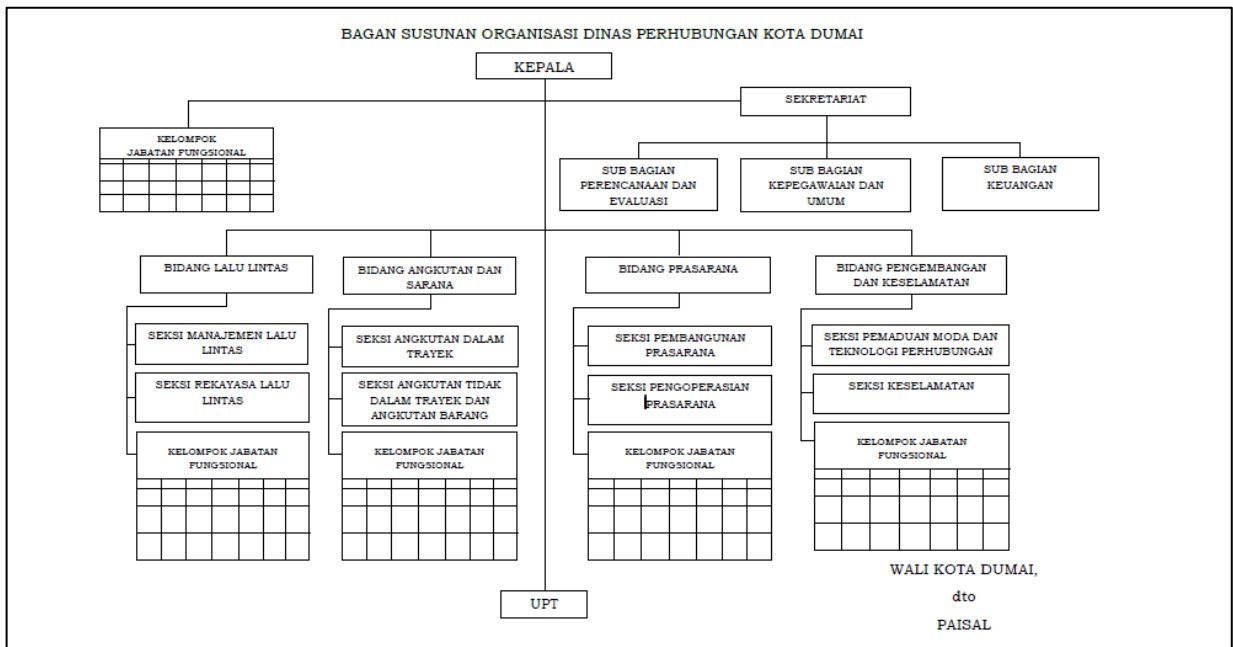
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) subbagian yakni :
 - 2.1 Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
 - 2.2 Subbagian Keuangan; dan
 - 2.3 Subbagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Lalu Lintas, membawahi :
 - 3.1 Seksi Manajemen Lalu Lintas
 - 3.2 Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - 3.3 Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Prasarana, membawahi :
 - 4.1 Seksi Pembangunan Prasarana
 - 4.2 Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
 - 4.3 Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Angkutan dan Sarana, membawahi :
 - 5.1 Seksi Angkutan Dalam Trayek;

- 5.2 Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang; dan
- 6. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawahi :
 - 6.1 Seksi Keselamatan
 - 6.2 Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan; dan
 - 6.3 Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Dumai didukung dengan adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kota Dumai sebagai berikut:

- 1. UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A, yang terdiri dari:
 - 1.1 Kepala UPT ; dan
 - 1.2 Kasubbag Tata Usaha
- 2. UPT. Perparkiran, yang terdiri dari:
 - 2.1 Kepala UPT ; dan
 - 2.2 Kasubbag Tata Usaha

Gambar I.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Dumai



Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, didukung dengan 350 orang ASN, yang terdiri dari 86 orang Pegawai Negeri Sipil (Gol IV, Gol III dan Gol II) serta PPPK sebanyak 264 orang (Gol IX, Gol VII dan Gol V), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
ASN Dinas Perhubungan Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2025

No	Golongan Ruang	Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Keterangan
1.	Golongan IV	6	1.71	PNS
2.	Golongan III	44	12.57	PNS
3.	Golongan II	36	10.29	PNS
4.	Golongan IX	59	16.86	PPPK
5.	Golongan VII	26	7.43	PPPK
6.	Golongan V	179	51.14	PPPK
Jumlah		350	100.00	

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Dumai, 2025

Dinas Perhubungan didominasi oleh PPPK Golongan V sebanyak 51,4% dan PNS Golongan III sebanyak 12,57%. Pada Tabel 1.2, dapat dilihat bahwa PNS Dinas Perhubungan Kota Dumai terdiri dari Jabatan Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Fungsional Umum/Staf Pelaksana.

Tabel 1.2
PNS Dinas Perhubungan Berdasarkan Jenjang Jabatan Tahun 2025

No	Golongan Ruang	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Eselon II	1	1.16
2.	Eselon III	5	5.81
3.	Eselon IV	17	19.77
4.	Pejabat Fungsional	7	8.14
5.	Fungsional Umum / Staf Pelaksana	56	65.12
Jumlah		86	100.00

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Dumai, 2025

Tingkat pendidikan pegawai juga dilihat pada gambaran umum organisasi. Walaupun tingkat pendidikan tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja Dinas Perhubungan, namun hal tersebut menjadi syarat dasar ketetapan penerimaan ASN. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
ASN Dinas Perhubungan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

No	Golongan Ruang	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Strata II (S-2)	9	2.57
2.	Strata I (S-1)	83	23.71
3.	Diploma III (D-3)	45	12.86
4.	SLTA Sederajat	213	60.86
Jumlah		350	100.00

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Dumai, 2025

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kinerja selama Tahun 2025. Laporan Kinerja memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu tahun 2025 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan LKIP Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
4. Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4 ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu–isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

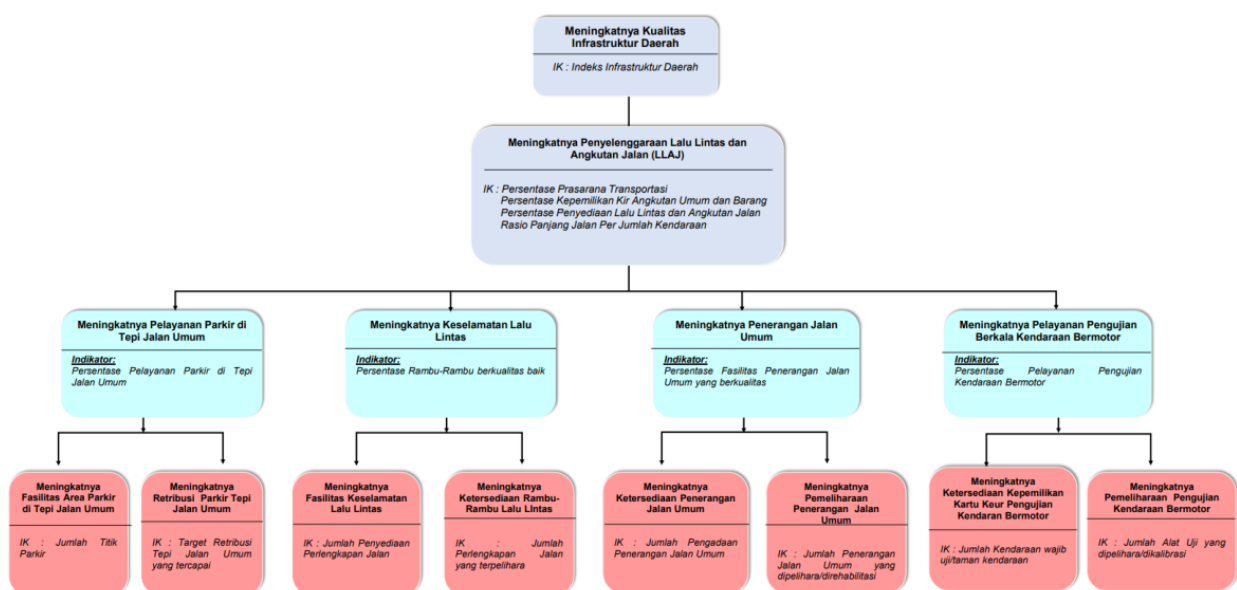
Isu strategis terkait dengan urusan Perhubungan yang perlu ditangani sebagai berikut :

1. Belum optimalnya perencanaan di bidang perhubungan darat, laut dan udara;
2. Tingginya pelanggaran *Over Dimension Over Loading* (ODOL) sebagai salah satu penyebab kerusakan jalan yang berdampak kepada keselamatan pengguna jalan;
3. Tingginya tingkat penggunaan angkutan pribadi dibandingkan angkutan umum;
4. Peningkatan volume lalu lintas di bandingkan kapasitas jalan yang tersedia;
5. Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung konektivitas antar wilayah;
6. Belum tertatanya sistem parkir di tepi jalan umum;
7. Angkutan umum tergeser dengan adanya transportasi berbasis online yang semakin menjamur.

1.5 CASCADING KINERJA

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Perhubungan Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I. 2 Cascading Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai



Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penyusunan peta proses bisnis dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun peta proses bisnis dilingkungan instansi pemerintah guna melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi. Tujuan penyusunan peta proses bisnis agar setiap instansi pemerintah:

- a. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. Mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan; dan
- c. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Adapun Peta proses Bisnis Dinas Perhubungan Kota Dumai sebagaimana skema berikut:

Gambar I. 3
Peta Proses Bisnis Dinas Perhubungan Kota Dumai

PROSES BISNIS / Sasaran		SUB PROSES BISNIS / Strategi		Peta Lintas Fungsi / Arah Kebijakan / Kegiatan (pilih "Arah Kebijakan" saja atau	
1		2		3	
Kode	PROSES UTAMA	Kode		Kode	
HUB 01	Tersedianya Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	HUB 01.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	HUB 01.01.01	Melaksanakan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ serta Menetapkan Kebijakan dan Sosialisasi
		HUB 01.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	HUB 01.02.01	Menyediakan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota seperti Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Penerangan Jalan, Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan, Fasilitas untuk Sepeda, Pejalan Kaki dan Penyandang Cacat, dan Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan Luar Badan Jalan
HUB 02	Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	HUB 02.01	Melaksanakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	HUB 02.01.01	Menyediakan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala, serta Penyediaan Bukti Lulus Uji Berkala
		HUB 02.02	Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	HUB 02.02.01	Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang serta Pengamanan Angkutan selama Ramadhan, Lebaran, Natal dan Tahun Baru
		HUB 02.03	Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	HUB 02.03.01	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Jalan Kabupaten/Kota
HUB 03	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Perhubungan	HUB 03.01	Meningkatkan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir, Parkir Tepi Jalan Umum serta Pengujian Kendaraan Bermotor	HUB 03.01.01	Peningkatan Kapasitas SDM serta Sarana dan Prasarana Pelayanan Tempat Khusus Parkir, Parkir Tepi Jalan Umum serta Pengujian Kendaraan Bermotor

Sumber data : Peta Proses Bisnis Dishub Kota Dumai, 2025

1.7 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Perhubungan sebagaimana tertuang dalam Surat Wali Kota Dumai Nomor 700/314-16/INSP-C/2025 Tanggal 29 September 2025 Perihal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Tahun 2025 pada Dinas Perhubungan Kota Dumai. Pada hasil evaluasi APIP, Dinas Perhubungan Kota Dumai memperoleh nilai 75,40 dengan Predikat BB. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu akuntabilitas yang sangat baik mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja sampai ke Level Eselon 3 / Koordinator. Adapun rincian hasil penilaian mandiri oleh Perangkat Daerah dan hasil evaluasi oleh APIP dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4
Rincian Hasil Penilaian Mandiri oleh Perangkat Daerah dan APIP

No.	Uraian	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024	Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025	
				Penilaian Mandiri	Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	30	17.40	24.00	21.00
2.	Pengukuran Kinerja	30	21.00	24.00	21.90
3.	Pelaporan Kinerja	15	11.25	12.00	11.25
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22.00	20.00	21.25
	Nilai Hasil Evaluasi	100	71.65	80.00	75.40
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB	BB

Sumber: Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Dinas Perhubungan, 2025

Berdasarkan nilai dan predikat yang diperoleh oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai, terdapat perbaikan pada 4 (empat) komponen penilaian yakni Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Perhubungan dalam rangka mendorong peningkatan akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah di Kota Dumai untuk masa mendatang. Rekomendasi yang disampaikan oleh APIP terkait penyusunan Perjanjian Kinerja beserta rencana aksinya bagi seluruh PNS dan PPPK, penambahan definisi operasional pada SK Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU dan pada Dokumen Renstra Tahun 2025 - 2029. Sebagaimana tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan, Dinas Perhubungan Kota Dumai telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel I.5
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

No	Rekomendasi LHE 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Aksi/ Eviden
1.	Melakukan upaya pemenuhan kelengkapan bukti dukung Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2025	PNS dan PPPK yang terdata belum membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 beserta Rencana Aksinya akan segera melengkapi dokumen yang dimaksud	Dokumen perencanaan kinerja, yang perlu dilengkapi; - Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (PNS dan PPPK) - Rencana Aksi Tahun 2025 (PNS dan PPPK)	3 Oktober 2025	Kepala Dinas	Output Sudah Tercapai	https://drive.google.com/drive/folders/15XgNIZ4vX2w4DUjn2WA6GPKPztHqW8Ng?usp=sharing
2.	Melakukan upaya pemenuhan kelengkapan bukti dukung Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2025	PNS yang terdata belum melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Rencana Aksi Tahun 2025 akan segera melengkapi dokumen dimaksud	Dokumen pengukuran kinerja, yang perlu dilengkapi; - Monev Rencana Aksi Tahun 2025 (PNS)	3 Oktober 2025	Kepala Dinas	Output Sudah Tercapai	https://drive.google.com/drive/folders/16l4r_EH3x6yO7uUNfzK8kAuUICoEBSJf?usp=drive_link
3.	Melakukan upaya pemenuhan kelengkapan bukti dukung Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2025	Memerintahkan kepada Fungsional Perencana untuk melengkapi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Surat Keputusan IKU (untuk tahun 2025-2029) dan Renstra (untuk tahun 2025-2029) Bab IV tabel 4.5 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan penjelasan/defenisi operasional	Dokumen pelaporan, yang perlu dilengkapi; - Surat Perintah Tugas - SK Penetapan IKU Dishub 2025-2029 - Definisi Operasional pada Dokumen Renstra 2025-2029	3 Oktober 2025	Kepala Dinas	Output Sudah Tercapai	https://drive.google.com/drive/folders/1ivT5SU4CTVYNZHIpH1J47xqla_es_Jwa?usp=drive_link

Sumber: LHE dan Matrik Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE Dishub Kota Dumai, 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2026 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2026.

Dinas Perhubungan Kota Dumai menyusun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Perhubungan Kota Dumai

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 yaitu “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua.

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024

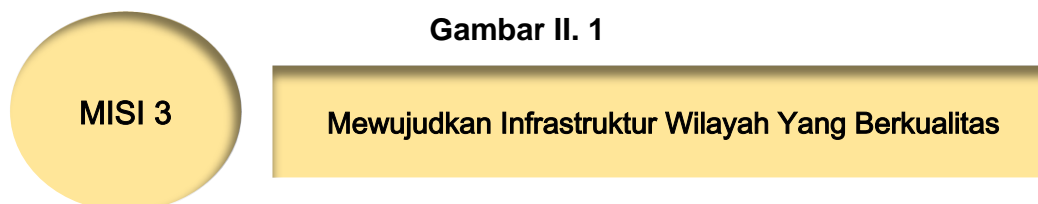
yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:



2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Dinas Perhubungan Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021-2026.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Perhubungan Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Dinas Perhubungan Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II. 1
Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran
Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026

IKU WALIKOTA			IKU DINAS PERHUBUNGAN		
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Renstra
Mewujudkan Infrastruktur dan Ruang Kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur Kota	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Daerah	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan Indikator keberhasilan yaitu persentase tersedianya sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Prasarana Transportasi 2. Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang 3. Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 4. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Dumai dan Perubahan Renstra Dishub Tahun 2021-2026

2.3 KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Dinas Perhubungan Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel II. 2
Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025

VISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)			
MISI KE 3 : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan Indikator keberhasilan yaitu persentase tersedianya sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan, Pemeliharaan/Perbaikan, Peningkatan kualitas infrastruktur Bidang Perhubungan	Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pemerataan infrastruktur Bidang Perhubungan

Sumber: Perubahan Renstra Dishub Kota Dumai 2021-2026

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Dinas Perhubungan Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II. 3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan

NO	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan Indikator keberhasilan yaitu persentase penyediaan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Prasarana Transportasi
		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang
		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Sumber: Perubahan Renstra Dishub Kota Dumai 2021-2026

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2025. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai di Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel II. 4
Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan Indikator keberhasilan yaitu persentase penyediaan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Prasarana Transportasi	78%
		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	75%
		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	75%
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	1.198,23 km : 98.424 unit

Sumber: Perjanjian Kinerja Dishub 2025

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp 74.760.450.556,- (*Tujuh Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) untuk melaksanakan 2 (dua) Program Kerja antara lain :

Tabel II. 5
Program Kerja dan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Dumai pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 31.048.492.790,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 43.711.957.766,-	APBD
J U M L A H		Rp 74.760.450.556,-	APBD

Sumber: Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai, 2025

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2025 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel II. 6
Program Kerja dan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Dumai pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 30.876.135.616,98	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 66.163.844.490,28	APBD
J U M L A H		Rp 97.039.980.107,26	APBD

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai, 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI TAHUN 2025

A. CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukur kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Perpres Nomor 29 Tahun 2014).

Dinas Perhubungan Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 - 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$\text{a. Rumus : } \text{capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$\text{b. Rumus : } \text{capaian} = \text{target} - \frac{\text{realisasi} - \text{target}}{\text{target}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

Tabel III. 2
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

Dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perhubungan Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Dinas Perhubungan Kota Dumai telah menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis/Kinerja Utama dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2025. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai pada tahun 2025 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel III.3 dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel III. 3
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2025

No	TUJUAN/SASARAN		2024		2025			
	Uraian	Indikator	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	68.5%	77.5%	76,5	76,5	100%	Sangat Berhasil
2.	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	68%	63%	75%	52%	69%	Cukup Berhasil
3.		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	1.198,23 km : 94.117 unit	1.198,23 km : 96.069 unit	1.198,23 km : 98.424 unit	1.198,23 km : 97.239 unit	98%	Sangat Berhasil
4.		Persentase Prasarana Transportasi	67%	67%	78%	78%	100%	Sangat Berhasil
5.		Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	70%	70%	75%	75%	100%	Sangat Berhasil

Berikut penjelasan dari capaian masing-masing Indikator pada Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025:

1) INDIKATOR PERSENTASE KEPEMILIKAN KIR ANGKUTAN UMUM DAN BARANG

KIR (Keur) adalah kegiatan uji berkala kendaraan bermotor yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Pengujian atas kendaraan angkutan umum menjadi hal yang wajib dikarenakan :

- ✚ memastikan kendaraan tidak membahayakan penumpang dan publik dengan memeriksa komponen vital seperti rem, suspensi, dan ban;
- ✚ kendaraan yang tidak memiliki Kir adalah suatu pelanggaran sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- ✚ menguji emisi gas buang dan kebisingan untuk standar lingkungan.

Jenis kendaraan yang wajib uji Kir yakni mobil penumpang umum (angkot, taksi, mobil sewa, ojek online); bus; truk dan mobil pengangkut barang; kereta gandengan/tempelan. Serta pemeriksaan yang dilakukan berupa pemeriksaan teknis seperti rangka, suspensi, rem, lampu, ban, dll serta pemeriksaan laik jalan berupa uji emisi gas buang, kebisingan, akurasi alat pengukur kecepatan.

Kepemilikan KIR (Keur) angkutan umum merujuk pada kewajiban setiap kendaraan angkutan umum untuk memiliki sertifikat lulus uji berkala dari Dinas Perhubungan, yang membuktikan kendaraan tersebut laik jalan, aman, dan memenuhi standar teknis serta emisi gas buang setiap enam bulan, demi menjaga keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya, dengan konsekuensi hukum bagi yang tidak memilikinya. Singkatnya Kepemilikan Kir pada angkutan umum adalah bukti legal bahwa kendaraan tersebut secara rutin diperiksa dan dinyatakan layak beroperasi, bukan sekedar dokumen kepemilikan kendaraan biasa. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Indikator Persentase Kepemilikan Angkutan Umum dan Barang adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah angkutan umum dan barang yang memiliki Kir pada tahun } n}{\text{Jumlah angkutan umum dan barang pada tahun } n} \times 100\%$$

Adapun rincian data Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) dan Jumlah Kendaraan Uji Tahun 2025 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel III.4
Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji dan yang Lulus Uji Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah KBWU	Jumlah Kendaraan Uji	Hasil Uji		Numpang Uji		Mutasi Uji	
				Lulus	Tidak Lulus	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar
1.	Januari	2020	189	187	2	19	51	0	0
2.	Februari	2057	257	250	7	19	7	3	2
3.	Maret	2081	175	168	7	9	13	3	0
4.	April	2115	115	113	2	5	53	0	0
5.	Mei	2150	111	107	4	9	37	1	1
6.	Juni	2172	82	81	1	4	49	0	2
7.	Juli	2215	178	174	4	10	77	1	2
8.	Agustus	2226	60	59	1	1	19	0	1
9.	September	2227	4	4	0	0	1	0	0

No	Bulan	Jumlah KBWU	Jumlah Kendaraan Uji	Hasil Uji		Numpang Uji		Mutasi Uji	
				Lulus	Tidak Lulus	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar
10.	Oktober	2229	0	0	0	0	15	0	0
11.	November	2240	0	0	0	0	50	0	3
12.	Desember	2250	0	0	0	0	79	0	3
Jumlah		2250	1171	1143	28	76	451	8	14

Sumber : UPT. PKB, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah angkutan umum dan barang yang memiliki kir atau telah lulus uji kir sebanyak 1171 unit, dan jumlah angkutan umum dan barang yang wajib uji sebanyak 2250 unit.

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 75% realisasi sebesar 52% dengan capaian kinerja 69% atau bernilai kinerja sedang. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 63% dari target 68% atau tercapai sebesar 93% maka capaian tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 24%.

Efisiensi Anggaran	0,86%
Nilai Anggaran	Rp61.950.000,00
Capaian 2025	69%
Target	75%
Realisasi	52%

Pagu anggaran yang ditetapkan pada indikator persentase kepemilikan kir angkutan umum dan barang adalah sebesar Rp 61.950.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 49.950.000,- atau sebesar 80,63%.

Dari realisasi anggaran yang diperoleh, efisiensi anggaran untuk indikator persentase kepemilikan kir angkutan umum dan barang adalah sebesar 0.86%.

2) INDIKATOR PERSENTASE PRASARANA TRANSPORTASI

Prasarana transportasi adalah infrastruktur fisik pendukung sistem transportasi seperti jalan, jembatan, rel kereta, pelabuhan, dan bandara, yang memungkinkan pergerakan orang dan barang. Fungsi utamanya adalah menyediakan jaringan penghubung yang aman dan efisien untuk mobilitas antar wilayah dan memajukan kegiatan ekonomi.

Pelabuhan laut, udara dan terminal bus menjadi salah satu prasarana transportasi yang memegang peranan penting dalam perkembangan suatu daerah khususnya Kota Dumai, yang mana pelabuhan yang merupakan salah satu “pintu masuk” bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan 80% kegiatan ekspor impor dilakukan melalui pelabuhan ini. Indikator Persentase Prasarana Transportasi dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah angkutan umum dan barang yang memiliki Kir pada tahun } n}{\text{Jumlah angkutan umum dan barang pada tahun } n} \times 100\%$$

Adapun prasarana transportasi di Kota Dumai sampai dengan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel III.5
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus Tahun 2025

No	Jenis Prasarana Transportasi	Jumlah
1.	Pelabuhan Penumpang	2 Unit
2.	Pelabuhan Ro-Ro	1 Unit
3.	Bandar Udara Pinang Kampai	1 Unit
4.	Terminal Penumpang Tipe A	1 Unit
5.	Jembatan Penyeberangan Orang	1 Unit
6.	Pos Retribusi Pembantu Syech Umar	1 Unit

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Dumai, 2025

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah prasarana transportasi sampai dengan tahun 2025 sebanyak 7 Unit dengan target sebanyak 9 Unit atau 78%. Pada tahun 2025, Dinas Perhubungan Kota Dumai memaksimalkan pengoperasian pos retribusi pembantu Syech Umar yang beralamat di Jl. Jalan Gatot Subroto, Kota Dumai yang telah selesai pembangunannya di Tahun 2024. Dengan adanya penambahan pos retribusi tersebut, harapannya Dinas Perhubungan dapat terus meningkatkan penyediaan sarana transportasi di Kota Dumai guna meningkatkan aksesibilitas antar wilayah seperti Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C sebagai simpul transportasi perkotaan, Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal serta Pengelolaan Perkeretaapian yang menjadi kewenangan pemerintah kota.

Efisiensi Anggaran	1.09%
Nilai Anggaran	Rp 14.621.693.479,28
Capaian 2025	100%
Target	78%
Realisasi	78%

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Prasarana Transportasi menunjukkan capaian yang tetap.

Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 78% realisasi sebesar 78% dengan tingkat capaian kinerja 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 67% atau tercapai sebesar 100% maka capaian tahun 2025 sama dengan capaian di tahun 2024 sebesar 100%. Pagu anggaran yang ditetapkan pada indikator Persentase Prasarana Transportasi sebesar Rp 14.621.693.479,28 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 13.444.761.584.75 atau sebesar 91,95%. Dari realisasi anggaran yang diperoleh, efisiensi anggaran untuk indikator persentase prasarana transportasi adalah sebesar 1.09%

3) INDIKATOR PERSENTASE PENYEDIAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Penyediaan perlengkapan jalan adalah proses pengadaan dan pemasangan fasilitas pendukung untuk meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Sesuai amanat Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 25 disebutkan bahwa "Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa;

- ✚ Rambu Lalu lintas;
- ✚ Marka Jalan;
- ✚ Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas;
- ✚ Alat Penerangan Jalan;
- ✚ Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan;
- ✚ Alat pengawasan dan pengaman jalan;
- ✚ Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; serta
- ✚ Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan atau diluar badan jalan

Tujuan penyediaan perlengkapan jalan yakni memberikan informasi, peringatan, larangan, perintah dan petunjuk kepada pengguna jalan; mencapai arus lalu lintas yang selamat, seragam dan efisien; serta mengurangi angka kecelakaan

lalu lintas. Indikator Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diukur dengan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia pada Tahun } n}{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$$

Adapun Jumlah Penyediaan/Pengadaan Perlengkapan Jalan Tahun 2025 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel III.6
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Jalan Tahun 2025

No	Jenis Perlengkapan Jalan	Jumlah
1.	Alat Penerangan Jalan	1157 Unit
2.	Marka Jalan	21 Lokasi
3.	Rambu Lalu Lintas	600 Unit
4.	Alat Pendukung Kegiatan LLAJ (Cermin Tikungan dan Paku Jalan)	117 Unit
JUMLAH		1895 Unit
TARGET TAHUN 2025		2526 Unit
REALISASI		75%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Dumai, 2025

Efisiensi Anggaran	1.98%
Nilai Anggaran	Rp19.764.235.040,-
Capaian 2025	100%
Target	75%
Realisasi	75%

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menunjukkan capaian yang tetap.

Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 75% realisasi sebesar 75% tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 70% atau tercapai sebesar 100% maka capaian tahun 2025 sama dengan capaian di tahun 2024 sebesar 100%.

Pagu anggaran yang ditetapkan pada indikator persentase penyediaan lalu lintas dan angkutan jalan sebesar Rp 19.764.235.040,- dengan realiasi anggaran sebesar 10.002.718.273.36 atau sebesar 50,61%. Dari realisasi anggaran yang diperoleh, efisiensi anggaran untuk indikator persentase penyediaan lalu lintas dan angkutan jalan adalah sebesar 1.98%.

4) INDIKATOR RASIO PANJANG JALAN PER JUMLAH KENDARAAN

Nilai rasio panjang jalan per jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan. Untuk Indikator Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan dihitung dengan formulasi:

$$\text{Panjang Jalan} : \text{Jumlah Kendaraan}$$

Panjang jalan yang dihitung sesuai Keputusan Wali Kota Dumai Nomor 613/DPUPR/2017 Tentang Ruas - Ruas Jalan sebagai Jalan Kota yakni sepanjang 1.198,23 km sedangkan jumlah kendaraan di Kota Dumai pada tahun 2025 sebanyak 97.239 unit kendaraan dengan rincian:

Tabel III.7
Jumlah Kendaraan di Kota Dumai Tahun 2025

Komponen	Satuan	Jumlah Kendaraan
Mobil Penumpang	Unit	20.479
Bus	Unit	155
Truck	Unit	6.659
Sepeda Motor	Unit	69.946
TOTAL		97.239

Sumber : Satlantas Polres Dumai, 2025

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah Kendaraan di Kota Dumai pada Tahun 2025 sebanyak 97.239 unit bila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebanyak 96.069 unit, artinya terdapat peningkatan jumlah kendaraan di Kota Dumai sebanyak 1.170 unit.

Sehingga bila dilihat dari proyeksi target jumlah kendaraan di Kota Dumai pada Tahun 2025 sebanyak 98.424 unit bila dibandingkan dengan realisasi di Tahun 2025, maka capaian pada Indikator Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan sebesar 98,42% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian} : 98.424 - (97.239 - 98.424) / 98.424 \times 100\% = 98,42 \%$$

Dimana :

$$\text{Target Kendaraan Tahun 2025} = 98.424 \text{ Unit}$$

$$\text{Jumlah Kendaraan Tahun 2025} = 97.239 \text{ Unit}$$

Indikator Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan merupakan Indikator yang bernilai Negatif, artinya semakin rendah capaian maka semakin baik kinerjanya, hal ini dikarenakan bila semakin banyak jumlah kendaraan yang ada di jalan Kota Dumai maka semakin menimbulkan masalah kemacetan lalu lintas di jalan Kota Dumai begitupun sebaliknya

Efisiensi Anggaran	1.58%
Nilai Anggaran	Rp 1.006.944.500,-
Capaian 2025	98%
Target	1.198,23 km : 98.424 unit
Realisasi	1.198,23 km : 97.239 unit

Capaian kinerja untuk indikator Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan, target yang ditetapkan tahun 2025 adalah

1.198,23 km : 98.424 unit dan realisasi sebesar 1.198,23 km : 97.239 unit dengan tingkat capaian 98% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 1.198,23 km : 96.069 unit atau tercapai sebesar 98% maka capaian tahun 2025 sama dengan capaian di tahun 2024 sebesar 98%.

Pagu anggaran yang ditetapkan pada indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sebesar 1.006.944.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 624.780.500,- atau sebesar 62,05%. Dari realisasi anggaran yang diperoleh, efisiensi anggaran untuk indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah sebesar 1.58%.

3.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan perbandingan untuk melihat tabel peningkatan atau penurunan suatu capaian kinerja, sehingga bisa dievaluasi dan diperbaiki untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel III. 8
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

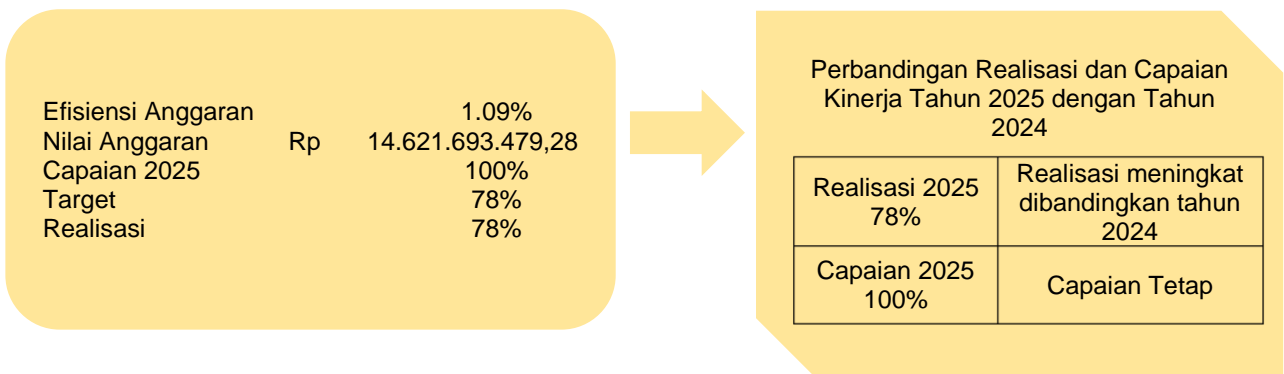
No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian			Keterangan
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
1	Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	58	68,5	76,5	51,5	68,5	76,5	89	100	100	-
		Persentase Prasarana Transportasi	56	67	78	56	67	78	100	100	100	-
2	Sasaran: Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum dan Barang	61	68	75	89	63	52	146	93	69	-
3		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	60	70	75	88	70	75	147	100	100	-
4		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	1.198,23 km : 90.081 unit	1.198,23 km : 94.117 unit	1.198,23 km : 98.424 unit	1.198,23 km : 94.842 unit	1.198,23 km : 96.069 unit	1.198,23 km : 97.239 unit	95	98	98	-

Sumber data : Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 dan 2024

Dari perbandingan Tabel diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. INDIKATOR PERSENTASE PRASARANA TRANSPORTASI

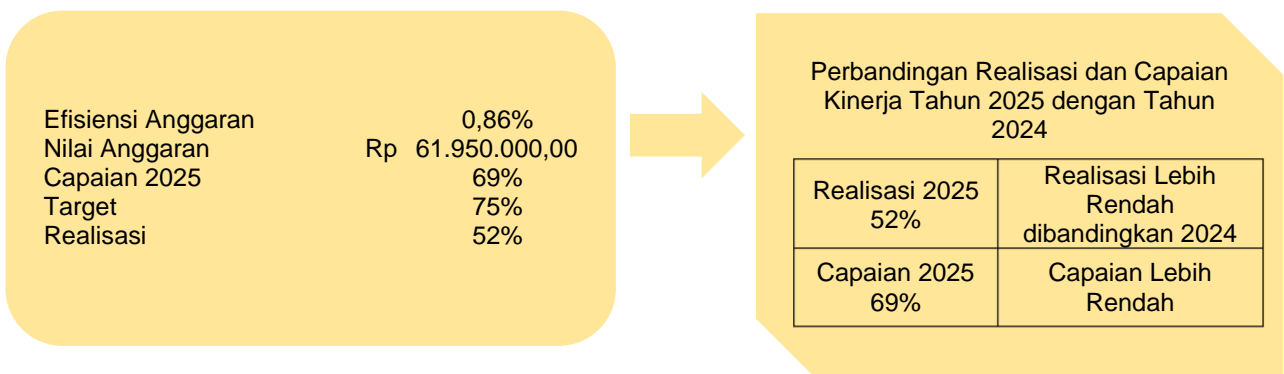
- a. Indikator Persentase Prasarana Transportasi berasal dari perhitungan jumlah prasarana transportasi pada tahun n dibagi jumlah prasarana transportasi yang seharusnya tersedia dikali 100%.
- b. Pada tahun 2023 jumlah prasarana transportasi sebanyak 5 unit dengan target jumlah prasarana yang seharusnya tersedia sebanyak 9 unit. Realisasi pada tahun 2023 adalah 56% dengan capaian 100%.
- c. Pada tahun 2024 target prasarana transportasi 67% dan realisasinya adalah 67% dengan rincian jumlah prasarana transportasi bertambah menjadi 6 unit (Pos Retribusi Pembantu Syech Umar yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto) berbanding jumlah prasarana yang seharusnya tersedia sebanyak 9 unit sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.
- d. Pada tahun 2025 target prasarana transportasi sebesar 78% dengan capaian 78% atau sebesar 100%. Capaian kinerja persentase prasarana transportasi tahun 2025 dan 2024 tidak mengalami perubahan atau sama yakni 100%.



2. INDIKATOR PERSENTASE KEPEMILIKAN KIR ANGKUTAN UMUM DAN BARANG

- a. Indikator Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang dengan berasal dari perhitungan Jumlah angkutan umum yang memiliki kir pada tahun n dibagi jumlah angkutan umum pada tahun n dikali 100%.
- b. Pada tahun 2023, Jumlah angkutan umum dan barang yang memiliki Kir sebanyak 3.664 unit dan Jumlah angkutan umum dan barang yang wajib uji di sebanyak 4.121 capaian kinerja 146%.

- c. Pada tahun 2024 capaian kinerja indikator ini adalah 63% dari target 68% dengan rincian Jumlah angkutan umum dan barang yang memiliki Kir Tahun 2024 sebanyak 2.310 unit dan Jumlah angkutan umum dan barang yang wajib uji di Tahun 2024 sebanyak 3.647 unit sehingga capaian kinerjanya sebesar 93%.
- d. Pada Tahun 2025 target kinerja indikator ini adalah 75% dengan capaian kinerja 52% yakni Jumlah angkutan umum dan barang yang memiliki Kir atau telah lulus uji pada Tahun 2025 sebanyak 1171 unit dan Jumlah angkutan umum dan barang yang wajib uji di Tahun 2025 sebanyak 2250 unit. Sehingga realisasi untuk Indikator ini sebesar 52% lebih rendah bila dibandingkan dengan target sebesar 75% dengan tingkat capaian Indikator sebesar 69%.
- e. Tidak tercapainya target yang ditetapkan tersebut dikarenakan kesadaran para pemilik kendaraan untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor sehingga terjadi penurunan jumlah kendaraan yang seharusnya wajib dilakukan pengujian, tidak beroperasinya UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor beberapa saat dikarenakan adanya alat uji yang mengalami kerusakan sehingga beberapa item pengujian tidak dapat dilaksanakan.

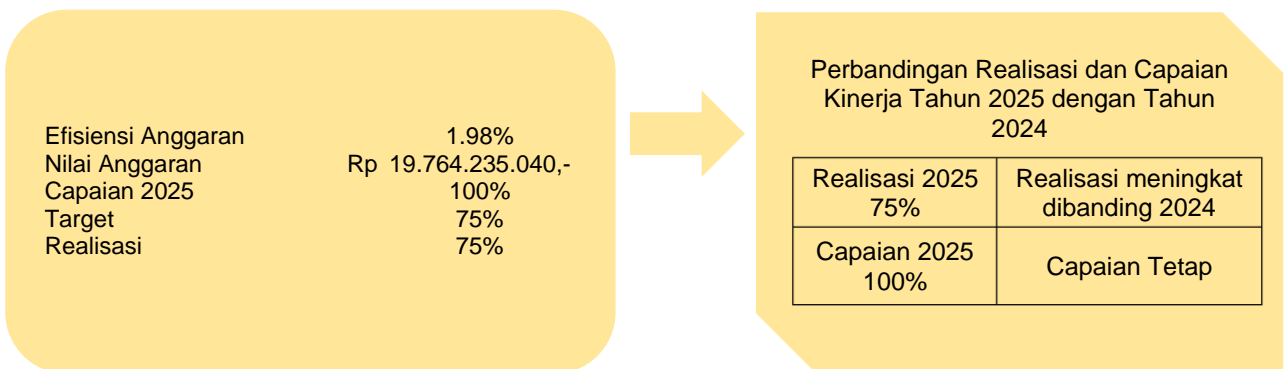


3. INDIKATOR PERSENTASE PENYEDIAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

- a. Indikator Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berasal dari perhitungan Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia pada tahun n dibagi Jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya tersedia dikali 100%.
- b. Pada tahun 2023, kedua Indikator (persentase pembangunan prasana jalan dan persentase penyediaan lalu lintas dan angkutan jalan) dirubah dan digabungkan menjadi 1 (satu) indikator yaitu persentase penyediaan lalu lintas dan angkutan jalan, target kinerja naik menjadi 60% dan realisasinya adalah 88% dengan rincian perlengkapan jalan yang telah dilaksanakan di tahun 2023 yakni

Pengadaan Rambu Lalu Lintas sebanyak 216 unit dari target 86 unit, Alat Penerangan Jalan sebanyak 991 unit dari target 800 unit, Marka Jalan di 8 lokasi dari target 15 lokasi, Alat pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebanyak 506 unit dari target 500 unit. Sehingga jika dirata-ratakan seluruh pengadaan perlengkapan jalan di Tahun 2023 sebesar 88% dari target yang ditetapkan sebesar 60% dengan tingkat capaian 147%.

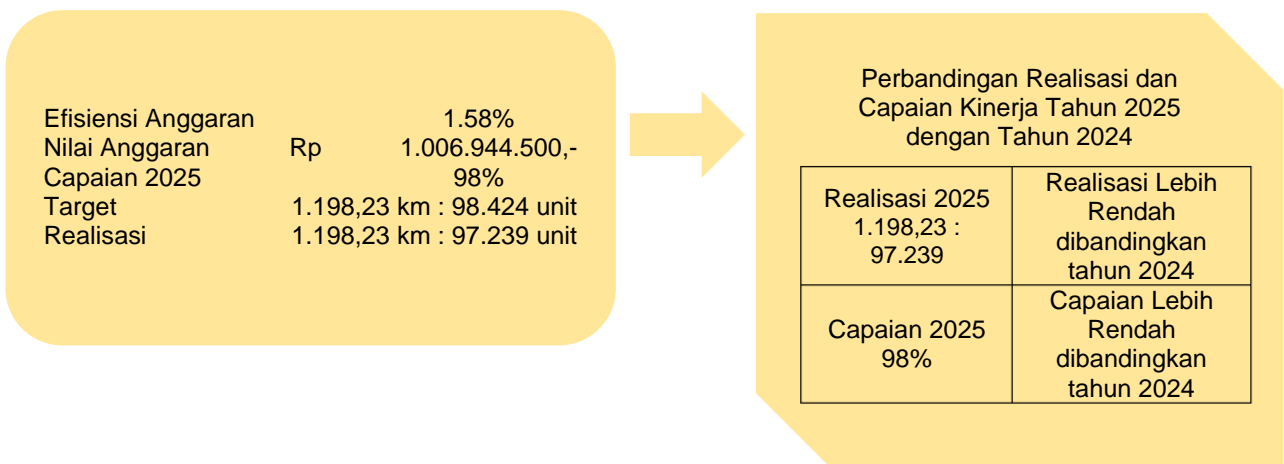
- c. Pada tahun 2024 target kinerja naik menjadi 70% dan realisasinya adalah 70% dengan rincian pengadaan alat penerangan jalan serta rambu-rambu lalu lintas dan alat keselamatan lalu lintas lainnya yang tersebar di Kota Dumai jika dirata-ratakan seluruhnya sebanyak 70% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.
- d. Pada tahun 2025 target kinerja mengalami kenaikan menjadi 75% dengan realisasi 75% atau tingkat capaian 100%. Bila dibandingkan dengan tahun 2024 capaian untuk indikator ini sama yakni 100% meskipun dengan target dan realisasi yang lebih tinggi di tahun 2025.



4. INDIKATOR RASIO PANJANG JALAN PER JUMLAH KENDARAAN

- a. Indikator Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan berasal dari perhitungan Jumlah kendaraan dibagi panjang jalan.
- b. Pada tahun 2023 formulasi yang digunakan untuk menghitung indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan mengalami perubahan bila dibandingkan dengan tahun lalu. Sehingga bila menggunakan formulasi saat ini, untuk tahun 2022 capaian indikatornya sebesar 94% sedangkan di tahun 2023 tingkat capaiannya 95% artinya terjadi peningkatan 1% hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah kendaraan di Kota Dumai sebanyak 9.429 unit bila dibandingkan dengan tahun lalu. Pada Tahun 2023, Panjang jalan di Kota Dumai sepanjang 1.198,23 km dibanding jumlah kendaraan di Kota Dumai sebanyak 94.842 unit, dengan target 1.198,23 km : 90.081 unit dengan tingkat capaian indikator sebesar 95%.

- c. Pada tahun 2024 target kinerja menjadi 1.198,23km : 94.117unit dan realisasinya adalah 1.198,23km : 96.069unit dengan rincian jumlah kendaraan pada tahun 2024 yakni mobil penumpang 20.109 unit, bus 142 unit, truck 7.253 unit, sepeda motor 68.565 unit, sehingga capaian kinerjanya sebesar 98%.
- d. Pada tahun 2025 Jumlah Kendaraan di Kota Dumai pada Tahun 2025 sebanyak 97.239 unit bila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebanyak 96.069 unit, artinya terdapat peningkatan jumlah kendaraan di Kota Dumai sebanyak 1.170 unit. Sehingga bila dilihat dari proyeksi target jumlah kendaraan di Kota Dumai pada Tahun 2025 sebanyak 98.424 unit bila dibandingkan dengan realisasi di Tahun 2025, maka capaian pada Indikator Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan sebesar 98,42%.
- e. Indikator Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan merupakan Indikator yang bernilai Negatif, artinya semakin rendah capaian maka semakin baik kinerjanya, hal ini dikarenakan bila semakin banyak jumlah kendaraan yang ada di jalan Kota Dumai maka semakin menimbulkan masalah kemacetan lalu lintas di jalan Kota Dumai begitupun sebaliknya. Sehingga bila dibandingkan antara capaian tahun 2025 dan 2024, maka dapat disimpulkan bahwa capaian 2024 lebih baik dibandingkan dengan capaian tahun 2025.



3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021-2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel III. 9
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

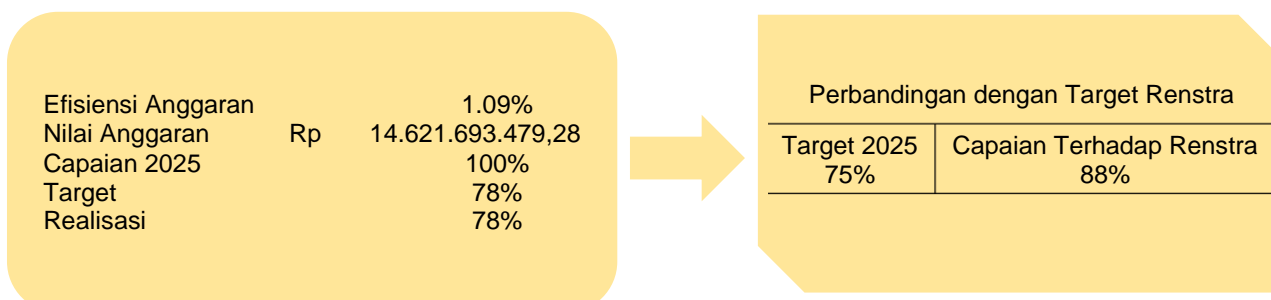
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Tujuan: Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan Sasaran: Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	84,5%	76,5%	91%
		Persentase Prasarana Transportasi	89%	78%	88%
		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	82%	52%	63%
		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	80%	75%	94%
		Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	1.198,23 km: 102.873 unit	1.198,23 km: 97.239 unit	95%

Sumber data : Dishub Kota Dumai Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025 sampai dengan Periode Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu:

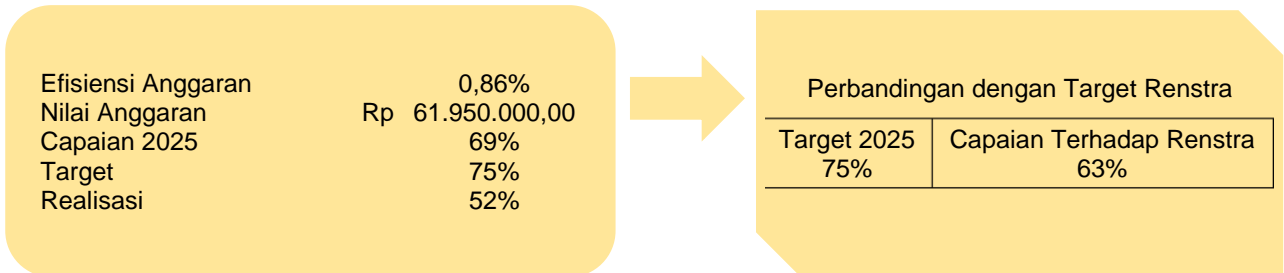
a. INDIKATOR PERSENTASE PRASARANA TRANSPORTASI

Pada perencanaan lima tahunan, capaian indikator Persentase Prasarana Transportasi tahun 2025 kurang dari target akhir Renstra yaitu sebesar 11 poin dari target Renstra sebesar 89% dan terealisasi 78% pada tahun 2025.



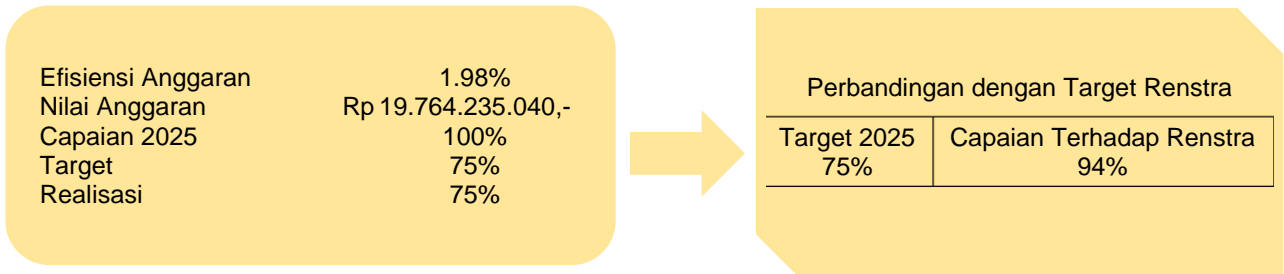
b. INDIKATOR PERSENTASE KEPEMILIKAN KIR ANGKUTAN UMUM DAN BARANG

Pada perencanaan lima tahunan, capaian indikator Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang tahun 2025 kurang dari target akhir Renstra yaitu sebesar 11 poin dari target Renstra sebesar 82% dan terealisasi 52%



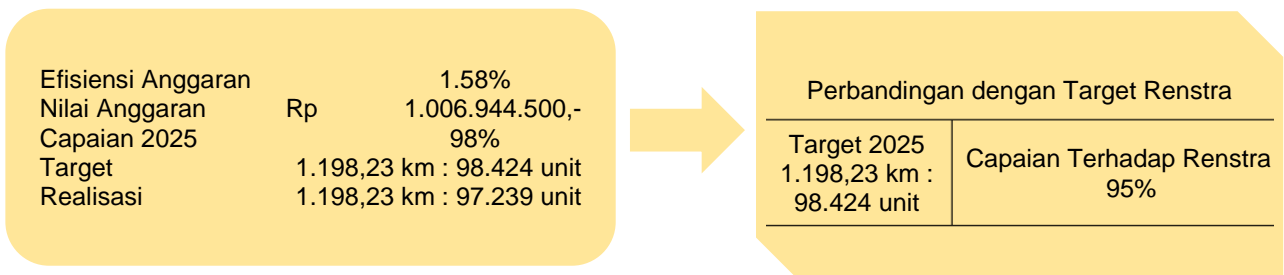
c. INDIKATOR PERSENTASE PENYEDIAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pada perencanaan lima tahunan, capaian indikator Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2025 kurang dari target akhir Renstra yaitu sebesar 14 poin dari target Renstra sebesar 80% dan terealisasi 75%



d. INDIKATOR RASIO PANJANG JALAN PER JUMLAH KENDARAAN

Pada perencanaan lima tahunan, capaian indikator Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan tahun 2025 melebihi dari target akhir Renstra yaitu sebesar 1.198,23 km : 102.873 unit dan terealisasi 1.198,23 km : 97.239 unit.



3.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel III. 10 berikut :

Tabel III. 10
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2025	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	<p>Tujuan: Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan</p> <p>Sasaran: Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p>	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	76,5%	-	Tidak Ada Target Nasional yang berhubungan langsung dengan kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai
		Persentase Prasarana Transportasi	78%	-	
		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	52%	-	
		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	75%	-	
		Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	1.198,23 km: 97.239 unit	-	

Sumber data : Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun, 2025

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat bahwa belum ada target nasional yang berhubungan langsung dnegan kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025.

3.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI

Berikut disampaikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang diberikan atas 4 (empat) Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Dumai :

1. INDIKATOR PERSENTASE PRASARANA TRANSPORTASI

- a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase Prasarana Transportasi menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 78% dengan realisasi sebesar 78% atau tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 67% atau tercapai sebesar 67%, maka capaian tahun 2025 sama dengan capaian tahun 2024.
- b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Persentase Prasarana Transportasi sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam menetapkan target telah memperhitungkan kondisi eksisting prasarana perhubungan yang ada dan kebutuhan prasarana yang akan datang sehingga dalam penetapan targetnya sesuai dengan perencanaan;
 - Kota Dumai telah memiliki prasarana transportasi darat, laut dan udara yang sangat membantu konektivitas antar wilayah bagi masyarakat pengguna jasa di bidang perhubungan.
- c. Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase Prasarana Transportasi adalah sebagai berikut:
- Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk penyediaan/pembangunan prasarana transportasi, seperti contohnya Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang merupakan simpul transportasi perkotaan yang sampai saat ini Kota Dumai belum memilikinya dan pembangunan dermaga pelabuhan pengumpan lokal di Kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sungai Sembilan serta pengelolaan perkeretaapian yang menjadi kewenangan pemerintah kota;
 - Prasarana Transportasi yang ada di Kota Dumai didominasi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan Kementerian Perhubungan.
- c. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase Prasarana Transportasi adalah sebagai berikut:
- Kedepannya Dinas Perhubungan Kota Dumai akan berupaya memberikan pelayanan terbaik di bidang perhubungan khususnya terkait transportasi di Kota Dumai dengan menata kembali trayek perkotaan dengan membangun Terminal Penumpang Tipe C sebagai simpul transportasi perkotaan;
 - Meningkatkan aksesibilitas dengan membangun dermaga pelabuhan pengumpan lokal di Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan serta telah memunculkan Program Pengelolaan Perkeretaapian pada dokumen RENSTRA 2025-2029 sesuai kewenangan Kabupaten/Kota.

2. INDIKATOR PERSENTASE KEPEMILIKAN KIR ANGKUTAN UMUM DAN BARANG

- a. Capaian Kinerja untuk indikator Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 75% dengan realisasi sebesar 52% atau tercapai 69% atau bernilai kinerja sedang. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 63% atau tercapai sebesar 93%, maka capaian tahun 2025 menurun sebesar 24%.
- b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang adalah sebagai berikut:
 - Dinas Perhubungan Kota Dumai melalui UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor terus berbenah dalam memberikan pelayanan pengujian yang maksimal kepada masyarakat dengan terus mengupgrade Alat Uji, meningkatkan kapasitas SDM Penguji, membangun bengkel dan lorong uji, ruang tunggu yang nyaman, dan telah membangun aplikasi alat uji UPT. PKB, serta yang terbaru bahwa tidak ada pungutan atas retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor atau segala kegiatan pengujian sudah tidak dikenakan biaya.
- c. Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang adalah sebagai berikut:
 - Kesadaran para pemilik kendaraan untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor atau uji kir secara berkala sedang menurun;
 - Belum seluruh kendaraan wajib uji yang melakukan pengujian kendaraan bermotor;
 - Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan pengujian laik jalan kendaraan dan uji emisi gas buang kendaraan;
 - Beberapa saat yang lalu, UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor tidak beroperasi dikarenakan adanya alat uji yang mengalami kerusakan, sehingga tidak maksimal dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor.
- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang adalah sebagai berikut:
 - Dinas Perhubungan Kota Dumai akan melaksanakan sosialisasi guna menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat dan perusahaan angkutan umum dan barang untuk melaksanakan pengujian kendaraan demi menjaga keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan;
 - Bekerjasama dengan instansi terkait dalam melaksanakan uji emisi gas buang kepada masyarakat di Kota Dumai.

3. INDIKATOR PERSENTASE PENYEDIAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

- a. Capaian Kinerja untuk indikator Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 75% dengan realisasi sebesar 75% atau tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 70% atau tercapai 100% maka capaian tahun 2025 sama dengan tahun 2024
- b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Komitmen Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam mendukung Program Walikota Dumai Khidmat Penerangan
 - Sejak dilaunching nya Aplikasi SIM PJU (Sistem Informasi Penerangan Jalan Umum) yang kemudian di upgrade menjadi Aplikasi Monitoring Integrasi (SIMONIT) Berbasis Android sehingga pengaduan dan keluhan dapat disampaikan oleh masyarakat bukan hanya terkait penerangan jalan namun seluruh permasalahan terkait perlengkapan jalan di Kota Dumai
- c. Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:
 - Penerangan Jalan belum merata dirasakan seluruh masyarakat Kota Dumai dikarenakan keterbatasan anggaran bila dibandingkan dengan usulan kebutuhan yang disampaikan kepada Dinas Perhubungan Kota Dumai.
- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:
 - Kedepannya Dinas Perhubungan Kota Dumai akan berupaya mengakomodir usulan – usulan kebutuhan masyarakat dengan memaksimalkan anggaran yang ada demi mendukung program Khidmat Penerangan di Kota Dumai;
 - Melakukan rehabilitasi/pemeliharaan perlengkapan jalan yang ada di Kota Dumai.

4. INDIKATOR RASIO PANJANG JALAN PER JUMLAH KENDARAAN

- a. Capaian Kinerja untuk indikator Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 1.198,23 km : 98.424 unit dengan realisasi sebesar 1.198,23 km : 97.239 unit atau tercapai 98% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 1.198,23 km : 96.069 unit tercapai 98%.
- b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan kurang dari target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Jumlah kendaraan yang diproyeksi pada tahun 2025 lebih tinggi bila dibandingkan data yang diperoleh dari Satlantas Polres Dumai
- c. Faktor penghambat Capaian Indikator Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan adalah sebagai berikut:
 - Idealnya Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Sehingga dengan adanya penambahan jumlah kendaraan yang tidak dibarengi dengan penambahan ruas jalan, hal tersebut yang akan memicu terjadinya peningkatan volume lalu lintas yang dapat menimbulkan kemacetan terutama di beberapa ruas jalan utama pada saat jam-jam sibuk.
- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan adalah sebagai berikut:
 - Peningkatan rasio jumlah kendaraan terhadap panjang jalan perlu dibarengi dengan kecepatan peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik, sehingga dapat menurunkan dan/atau mengurangi risiko peningkatan angka kecelakaan dan kemacetan di jalan Kota Dumai.

3.6 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 11
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Program	Indikator Program	Nama Program	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Anggaran (%)
	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terselenggaraanya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Tersedianya Prasarana Perhubungan darat yang layak	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	76,5	76,5	Persen	99.924.976.667,26	77.100.488.677,62	77,16
1.	Persentase Prasarana Transportasi				78	78	Persen			
2.	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang				75		Persen			
3.	Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				75	75	Persen			
4.	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan				1.198,23 : 94.117	1.198,23 : 97.239	Km / Unit			

Sumber data : SPJ Fungsional Dishub Tahun 2025

Pada tahun 2025, alokasi anggaran Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah sebesar Rp 99.924.976.667,26 (*sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh koma dua puluh enam rupiah*). Realisasi dari kegiatan sampai dengan akhir Desember 2025 adalah 77,16% atau sebesar Rp 77.100.488.677,62 (*tujuh puluh tujuh miliar seratus juga empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh dua rupiah*). Capaian tersebut didukung oleh 2 (dua) Program, 16 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan. Adapun uraian dari capaian tersebut adalah sebagai berikut:

PROGRAM 1 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini merupakan Program Non Urusan/Rutin Dinas Perhubungan yang terdiri dari Kegiatan dan Sub-Sub Kegiatan yang mendukung operasional dan tugas kedinasan perangkat daerah, meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian, protokol, serta penyediaan barang dan jasa penunjang seperti kebersihan, keamanan, dan perjalanan dinas. Dinas Perhubungan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 17.700.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 13.890.000,- dengan capaian sebesar 78,47%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 3 (tiga) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 7.680.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.280.000,- atau 68,75% dengan indikator keluaran (output) Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target kinerja keluaran 2 dokumen dan terealisasi 100% yakni dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.
 - 1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.190.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.780.000,- atau 72,83% dengan indikator keluaran (output) Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan target kinerja keluaran 1 dokumen dan terealisasi 100%.

- 1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.830.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.830.000,- atau 100% dengan indikator keluaran (output) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target kinerja keluaran 3 laporan yakni Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2024, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2024 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Dumai Tahun Anggaran 2025 dengan realisasi capaian sebesar 100%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 17.784.359.360,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 15.047.264.689,- dengan capaian sebesar 84,61%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 3 (tiga) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
 - 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 17.745.705.360,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 15.013.110.689,- atau 84,60% dengan indikator keluaran (output) Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan target kinerja keluaran 330 orang/bulan dan terealisasi 100%.
 - 2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 14.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 14.000.000,- atau 100% dengan indikator keluaran (output) Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan target keluaran 1 laporan dan terealisasi 100%.
 - 2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 24.654.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 20.154.000,- atau 81.75% dengan indikator keluaran (output) Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dengan target 2 laporan dan terealisasi 100%.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 7.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 7.500.000,- dengan capaian sebesar 100%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:
 - 3.1 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 7.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 7.500.000,- atau 100% dengan indikator keluaran (output) Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD dengan target keluaran 1 laporan terealisasi 100%.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 861.533.193,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 581.865.041,- dengan capaian sebesar 84,61%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 6 (enam) sub kegiatan sebagai berikut:
 - 4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 58.272.200,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 48.572.750,- atau 83,35% dengan indikator keluaran (output) Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target kinerja keluaran 1 paket dan terealisasi 83%.
 - 4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 142.356.350,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 117.091.205,- atau 82,25% dengan indikator keluaran (output) Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target kinerja keluaran 1 paket dan terealisasi 83%.
 - 4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 40.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 20.145.000,- atau 50,36% dengan indikator keluaran (output) Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan dengan target kinerja keluaran 1 paket dan terealisasi 75%.
 - 4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 178.117.250,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 125.792.053,- atau 70,62% dengan indikator keluaran (output) Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan dengan target kinerja keluaran 1 paket dan terealisasi 75%.

- 4.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 86.825.893,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 47.977.679,- atau 55,26% dengan indikator keluaran (output) Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan target kinerja keluaran 1 paket dan terealisasi 67%.
- 4.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 355.961.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 222.286.354,- atau 62,45% dengan indikator keluaran (output) Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target kinerja keluaran 1 laporan dan terealisasi 75%.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.564.866.930,98 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.432.108.980,98 dengan capaian sebesar 94,82%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:
 - 5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 458.497.750,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 325.739.800,- atau 71,05% dengan indikator keluaran (output) Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan dengan target kinerja keluaran 49 unit dan terealisasi 49% yakni Pengadaan AC 12 Unit, Pengadaan Kipas Angin 7 Unit, Pengadaan Kursi Rapat 20 Unit, Pengadaan Genset 1 Unit, Pengadaan Sangkar Meteorologi 1 Unit, Pengadaan Stabilizer 1 Unit, Pengadaan Televisi 1 Unit, Pengadaan Tiang Anemo Meteorologi 1 Unit, Pengadaan UPS Server 1 Unit, Pengadaan Videotron 1 Unit, Pengadaan PC Server SIM PKB 1 Unit, dan Pengadaan Printer Thermal 2 Unit.
 - 5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.106.369.180,98 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 2.106.369.180,98 atau 100% dengan indikator keluaran (output) Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan dengan target kinerja keluaran 1 unit yang mana fisiknya telah terealisasi 100% pada Tahun 2024 yakni Pembangunan Penambahan Ruang Gedung Kantor Dishub (Keterlambatan Pembayaran Tahun 2024).

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 9.879.894.980,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 8.848.356.263,- dengan capaian sebesar 89,56%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:
 - 6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.750.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 804.000,- atau 45,94% dengan indikator keluaran (output) Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat dengan target kinerja keluaran 1 laporan dan terealisasi 100%.
 - 6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.215.814.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 812.013.261,- atau 66,79% dengan indikator keluaran (output) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target kinerja keluaran 1 laporan dan terealisasi 100%.
 - 6.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 8.662.330.980,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 8.035.539.002,- atau 92,76% dengan indikator keluaran (output) Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan target kinerja keluaran 1 laporan dan terealisasi 100%.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.645.277.713,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.107.009.655,- dengan capaian sebesar 41,85%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:
 - 7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 613.818.452,98 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 503.370.155,- atau 82,01% dengan indikator keluaran (output) Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dengan target kinerja keluaran 37 unit atau 100%.
 - 7.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.210.584.260,02 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 502.764.500,- atau 41,53% dengan indikator

keluaran (output) Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target kinerja keluaran 182 unit dan terealisasi 100%.

7.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 820.875.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 100.875.000,- atau 12,29% dengan indikator keluaran (output) Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan target kinerja keluaran 4 unit dan terealisasi 100% yakni :

- ✚ Rehab Gedung Kantor UPT. Perparkiran,
- ✚ Rehab Gudang UPT. Perparkiran,
- ✚ Rehab Pagar UPT. Perparkiran,
- ✚ Rehab Tempat Parkir menjadi Gudang Peralatan; dan

Pada Tahun 2025 juga dibayarkan 1 (satu) pekerjaan yang Fisiknya telah selesai di Tahun 2024 dikarenakan kondisi keuangan yang mengharuskan adanya keterlambatan pembayaran (Tunda Bayar) yakni Kegiatan Pemasangan Paving Blok Kantor Dinas Perhubungan.

Secara umum, tidak ada kendala yang mengganggu dalam proses pelaksanaan kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Namun dalam proses pencairan / keuangan terdapat kendala dikarenakan kondisi keuangan daerah. Sehingga beberapa pekerjaan fisiknya telah selesai 100% namun keuangan belum terealisasi.

PROGRAM 2 PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Program ini merupakan Program Urusan pada Dinas Perhubungan Kota Dumai yang mencakup pembangunan prasarana, penyediaan perlengkapan jalan, pemeliharaan, hingga peningkatan kesadaran pengguna jalan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.011.315.955,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 415.014.955,- atau 41,04%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.011.315.955,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 415.014.955,- atau 41,04% dengan indikator keluaran (output) Jumlah

dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dengan target kinerja keluaran 7 dokumen dan terealisasi 7 dokumen atau 100% yakni :

- ✚ Dokumen Penataan dan Pengembangan Fasilitas Henti Angkutan Umum
- ✚ Dokumen Tatralok (Lanjutan)
- ✚ DED Pedestrian Jl. Kelakap Tujuh Ratu Sima
- ✚ DED Pedestrian Jl. Soekarno Hatta
- ✚ DED PJU Jl. Wan Amir
- ✚ Database PJU Kecamatan Dumai Barat
- ✚ FS Dermaga Multy Purpose

Sedangkan 3 dokumen lainnya yang telah selesai disusun pada Tahun 2024 namun baru dapat dibayarkan di Tahun 2025 dikarenakan adanya keterlambatan pembayaran, yakni sebagai berikut:

- ✚ DED Pedestrian Jl. Pangeran Diponegoro (Keterlambatan Pembayaran Tahun 2024)
- ✚ DED Rehabilitasi Fasilitas Perparkiran Khusus Angkutan Barang (Keterlambatan Pembayaran Tahun 2024)
- ✚ DED Pembangunan Halte Bus (Keterlambatan Pembayaran Tahun 2024)

2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp 62.360.251.535,28 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 47.164.231.277,11 atau 75,63%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 4 (empat) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

2.1 Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar 14.621.693.479,28 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 13.444.761.584,75 atau 91,95% dengan indikator keluaran (output) Jumlah prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota dengan target kinerja keluaran 1 Unit dan terealisasi 100% yakni Lanjutan Pembangunan Pos Retribusi Bukit Timah sedangkan 5 Unit prasarana jalan lainnya merupakan kegiatan di Tahun 2024 yang fisiknya telah selesai dikerjakan di Tahun 2024 dan baru dibayarkan di Tahun 2025, yakni :

- ✚ Lanjutan Pembangunan Posdallalin Simpang TPI Purnama
- ✚ Pembangunan Pos Retribusi Bukit Timah
- ✚ Pembangunan Pedestrian Taman Bukit Gelanggang
- ✚ Pembangunan Pedestrian Jalan Janur Kuning Jaya Mukti
- ✚ Pembangunan U-Turn

Gambar III. 1
Pembangunan Prasarana Jalan (Pos Retribusi dan Pedestrian)



2.2 Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 19.764.235.040,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 10.002.718.273,36 atau 50,61% dengan indikator keluaran (output) Jumlah penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota dengan target kinerja keluaran 1895 unit dan terealisasi 100% yakni :

- ✚ Pengadaan Alat Penerangan Jalan 1.157 unit
 - ✚ Pengadaan Papan Nama Jalan Kecamatan Dumai Kota 100 Unit
 - ✚ Pengadaan Papan Nama Jalan Kecamatan Dumai Barat dan Sungai Sembilan 130 Unit
 - ✚ Pengadaan Papan Nama Jalan Kecamatan Dumai Selatan 150 Unit
 - ✚ Papan Tarif Retribusi Angkutan Barang 8 Unit
 - ✚ Rambu RPPJ Himbauan Pos Retribusi 10 Unit
 - ✚ Rambu Tiang Tunggal 100 Unit
 - ✚ ZoSS Jl. Merdeka Kecamatan Dumai Kota dan ZoSS SD Estomih Kecamatan Dumai Timur
 - ✚ Cermin Tikungan 6 Unit
 - ✚ Marka Jalan Cempedak, Jl. Dock Yard, Jl. Jakolin, Jl. Bukit Datuk Lama, Jl. Simpang Panam, Jl. Daeng Togek Purnama, Jl. Ratu Sima Batang Berawan, Jl. Dermaga Darat, Jl. Sultan Hasanuddin, Jl. Janur Kuning, Jl. Pauh Jaya, Jl. Sadar
 - ✚ Marka Jalur Sepeda Kawasan Bukit Gelanggang
 - ✚ Marka Parkir se Kota Dumai
 - ✚ Marka Pita Penggaduh se Kota Dumai
 - ✚ Zebra Cross
 - ✚ Paku Jalan 111 Unit
 - ✚ Warning Light Simpang Bukit Timah menuju Jl. Perwira; dan
 - ✚ Warning Light Simpang Jl. Sidorejo menuju Jl. Tegalega Dumai Selatan
- Pada Tahun 2025 juga telah dilaksanakan pembayaran atas Belanja Modal Alat Kantor Lainnya - Pengadaan LPJU sebanyak 635 Unit yang Fisiknya telah selesai dilaksanakan pada Tahun 2024

2.3 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 885.790.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 148.198.650,- atau 16,73% dengan indikator keluaran (output) Jumlah prasarana jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara dengan target kinerja keluaran 4 unit dan terealisasi 100% yakni :

- ✚ Rehab Kanstin dan Median se Kota Dumai
- ✚ Rehab Median se Kota Dumai
- ✚ Rehab Pulau Jalan se Kota Dumai; dan
- ✚ Pembuatan Pagar Taman Lalu Lintas

Pada Tahun 2025 juga telah dilaksanakan pembayaran atas Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya - Rehab Median dan Pulau Jalan se Kota Dumai sepanjang 200 Meter yang Fisiknya telah selesai dilaksanakan pada Tahun 2024.

2.4 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 27.088.533.016,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 23.568.552.769,- atau 87,01% dengan indikator keluaran (output) Jumlah perlengkapan jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara dengan target kinerja keluaran 352 unit dan terealisasi 100% yakni :

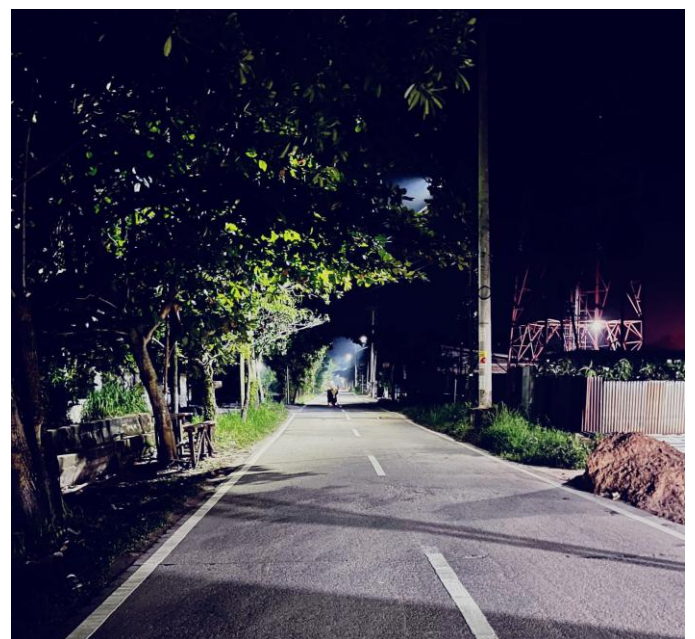
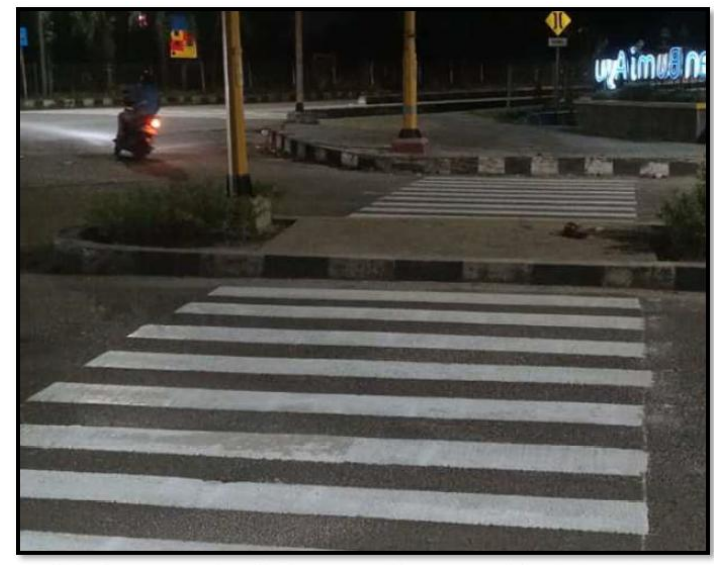
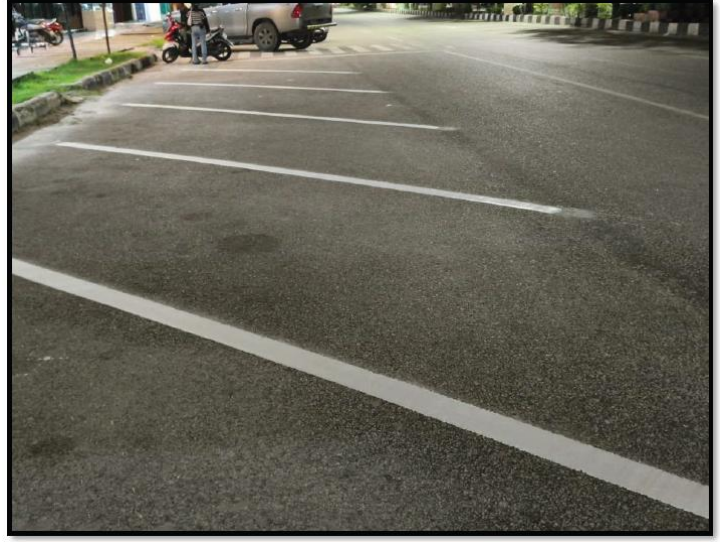
- ✚ Pemeliharaan PJU di 23 Lokasi di Kota Dumai 271 Unit
- ✚ Pemeliharaan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ) 14 Unit
- ✚ Pemeliharaan Rambu Tiang Tunggal 48 Unit
- ✚ Pemeliharaan Traffic Light 8 Unit
- ✚ Pemeliharaan Warning Light 8 Unit
- ✚ Rehab Traffic Light Simpang Kelakap Tujuh 3 Unit

Pada Tahun 2025 juga telah dilaksanakan pembayaran atas Belanja Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Darat - Pemeliharaan Rambu sebanyak 12 Unit yang Fisiknya telah selesai dilaksanakan pada Tahun 2024.

Gambar III. 2
Penyediaan Perlengkapan Jalan (Rambu, Papan Nama Jalan, RPPJ)



Gambar III. 3
Penyediaan Perlengkapan Jalan (Marka Jalan, Marka Parkir, Marka Sepeda, Marka Pita Penggaduh dan ZOSS)



Gambar III. 4
Penyediaan Perlengkapan Jalan (Alat Penerangan Jalan)



3. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dengan pagu anggaran sebesar Rp 673.980.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 493.478.816,53 atau 73,22%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan kedalam 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:

3.1 Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 380.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 278.998.816.53 atau 73,42% dengan indikator keluaran (output) Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan target kinerja keluaran 1 dokumen dan terealisasi 100%.

3.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 293.980.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 214.480.000,- atau 72,96% dengan indikator keluaran (output) Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target kinerja keluaran 1 laporan dan terealisasi 100%.

Gambar III. 5
Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Juru Parkir Tepi Jalan Umum



4. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran sebesar Rp 61.950.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 49.950.000,- atau 80,63%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan kedalam 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:

4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 49.950.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 49.950.000,- atau 100% dengan indikator keluaran (output) Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia dengan target kinerja keluaran 1 unit dan terealisasi 100%

Pada Tahun 2025 telah dilakukan pembayaran atas Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor - Pembuatan Kanopi Bengkel UPT. PKB yang Fisiknya telah selesai pada Tahun 2024 (Keterlambatan Pembayaran).

Gambar III. 6
Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor



4.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 12.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 0,- atau 0,00%. Belum terealisasinya anggaran pada sub kegiatan ini dikarenakan kondisi keuangan, sehingga kegiatan ini direncanakan akan dibayarkan pada Tahun 2026 dan telah dimasukkan kedalam rekap Keterlambatan Pembayaran Tahun 2026.

Adapun indikator keluaran (output) sub kegiatan tersebut yakni Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara dengan target kinerja keluaran 12 unit namun yang dilakukan pemeliharaan hanya 8 Unit alat uji dengan persentase 67%.

Gambar III. 7
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor



5. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.210.734.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 642.215.500,- atau 53,04%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan kedalam 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut:

5.1 Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.006.944.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 624.780.500,- atau 62,05% dengan indikator keluaran (output) Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota dengan target kinerja keluaran 1 laporan dan terealisasi 100% yakni Kegiatan pengaturan dan Penertiban Jam Larangan Angkutan Barang, Pam Lalin di persimpangan, Pasar, Sekolah, dan Simpang Traffic dan Kegiatan pengawasan dan penertiban lainnya. Masih rendahnya penyerapan anggaran sub kegiatan ini dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang tertunda pembayarannya dan telah dimasukkan kedalam rekap Keterlambatan Pembayaran Tahun 2026.

Gambar III. 8
Kegiatan Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas

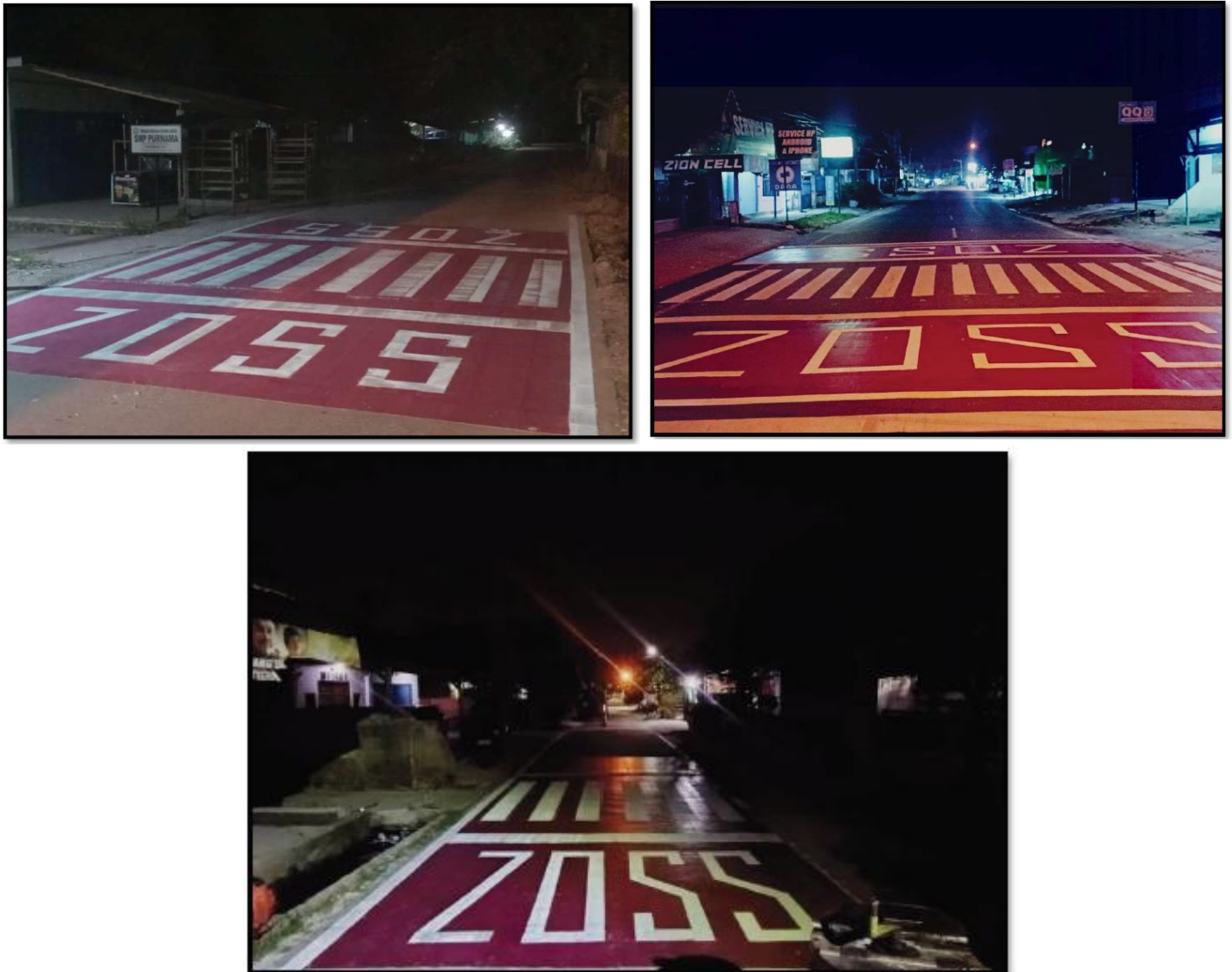


5.2 Sub Kegiatan Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS). Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 0,- atau 0,00%. Belum terealisasinya anggaran pada sub kegiatan ini dikarenakan kondisi keuangan, sehingga kegiatan ini direncanakan akan dibayarkan pada Tahun 2026 dan telah dimasukkan kedalam rekap Keterlambatan Pembayaran Tahun 2026.

Adapun indikator keluaran (output) sub kegiatan tersebut Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) dengan target kinerja keluaran 2 Unit dan terealisasi 100% pada lokasi :

- ✚ SMP Purnama Marwah Bangsa, Jl. Prof. M. Yamin; dan
- ✚ SDN 008 Bumi Ayu, Jl. Gunung Merapi

Gambar III. 9
Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)



- 5.3 Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota/ Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 30.290.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 17.435.000,- atau 57,56% dengan indikator keluaran (output) Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan target kinerja keluaran 1 Laporan dan terealisasi 100% yakni laporan hasil pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Dumai.
- Namun anggaran yang terealisasi di Tahun 2025 merupakan Keterlambatan Pembayaran atas pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Tahun 2024, sehingga untuk Kegiatan Forum LLAJ/Survey Eksisting Jalan di Kota Dumai pada Tahun 2025 direncanakan akan dibayarkan pada Tahun 2026 dikarenakan adanya Tunda Bayar.

Gambar III. 10
Kegiatan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan



- 5.4 Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 73.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 0,- atau 0,00%. Belum terealisasinya anggaran pada sub kegiatan ini dikarenakan kondisi keuangan, sehingga kegiatan ini direncanakan akan dibayarkan pada Tahun 2026 dan telah dimasukkan kedalam rekap Keterlambatan Pembayaran Tahun 2026. Adapun indikator keluaran (output) sub kegiatan tersebut yakni Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan pemasangan dengan target kinerja keluaran 49 unit dan terealisasi 100% yakni Pengadaan dan Pemasangan Rambu Tiang Tunggal di Kawasan Sekolah.
6. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp 6.969.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 0,- atau 0,00%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan kedalam 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:
 - 6.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 16.969.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 0,- atau 0,00%. Belum terealisasinya anggaran pada sub kegiatan ini dikarenakan kondisi keuangan, sehingga kegiatan ini direncanakan akan dibayarkan pada Tahun 2026 dan telah dimasukkan kedalam rekap Keterlambatan Pembayaran Tahun 2026. Adapun indikator keluaran (output) Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin dengan target kinerja keluaran 1 laporan dan terealisasi 100% yakni Laporan Persetujuan Penilaian Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah dilaksanakan di 5 (lima) Kecamatan di Kota Dumai yakni Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Dumai Barat dan Kecamatan Dumai Kota.

Gambar
Kegiatan Penilaian Andalalin Kota Dumai



7. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp 738.643.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 297.603.500,- atau 40,29%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan kedalam 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut

7.1 Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 418.687.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 94.217.000,- atau 22,50%. Masih rendahnya penyerapan anggaran sub kegiatan ini dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang tertunda pembayarannya dan telah dimasukkan kedalam rekap Keterlambatan Pembayaran Tahun 2026.

Adapun indikator keluaran (output) sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota dengan target kinerja keluaran 1 laporan dan terealisasi 100% yakni laporan verifikasi calon penerima bantuan sosial transportasi bagi ojek online dan ojek konvensional di Kota Dumai.

7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 319.956.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 203.386.500,- atau 63,57%. Masih

rendahnya penyerapan anggaran sub kegiatan ini dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang tertunda pembayarannya dan telah dimasukkan kedalam rekap Keterlambatan Pembayaran Tahun 2026. Adapun indikator keluaran (output) sub kegiatan ini adalah Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia dengan target kinerja keluaran 1 unit dan terealisasi 100%.

Gambar III. 12
Kegiatan Pos Pengamanan dan Pelayanan Natal dan Tahun Baru



8. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 0,- atau 0,00%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan kedalam 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:

8.1 Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 0,- atau 0,00%. Belum terealisasinya anggaran pada sub kegiatan ini dikarenakan kondisi keuangan, sehingga kegiatan ini direncanakan akan dibayarkan pada Tahun 2026 dan telah dimasukkan kedalam rekap Keterlambatan Pembayaran Tahun 2026. Adapun indikator keluaran (output) sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target kinerja keluaran 1 Dokumen yakni Perencanaan Penyusunan Dokumen Rute Aman Sekolah (RAS) Kota Dumai.

3.7 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Perhubungan Kota Dumai dapat dilihat pada tabell berikut ini :

Tabel III. 12
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran
1	Tujuan: Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan Sasaran: Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	100%	71,28
		Persentase Prasarana Transportasi	100%	91,95
		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	69%	80,63
		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100%	50,61
		Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	98%	62,05

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Dumai, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Prasarana Transportasi tingkat efisiensinya adalah 1,40 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2025 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2025 (71,28%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori Sangat Efisien;
2. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang adalah 0,86 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2025 (69%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2025 (80,63%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori Efisien;
3. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat efisiensinya adalah 1,98 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2025 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2025 (50,61%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori Sangat Efisien;
4. Pada Indikator Kinerja Utama Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan tingkat efisiensinya adalah 1.58 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2025 (98%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (62,05%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori Sangat Efisien;

3.8 PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Dumai belum mendapatkan penghargaan atau prestasi dari pemerintah daerah, provinsi maupun pusat.

Tabel III.13
Prestasi dan Penghargaan Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
NIHIL				

B. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2025. Adapun anggaran per sasaran tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel III. 14
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Tahun 2025

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33,761,132,176.98	28,037,994,628.98	83.05
	Indikator Program: Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17,700,000.00	13,890,000.00	78.47
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,680,000.00	5,280,000.00	68.75
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,190,000.00	3,780,000.00	72.83
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,830,000.00	4,830,000.00	100.00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17,784,359,360.00	15,047,264,689.00	84.61
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17,745,705,360.00	15,013,110,689.00	84.60
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14,000,000	14,000,000.00	100.00
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24,654,000	20,154,000.00	81.75
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	861,533,193.00	581,865,041.00	67.54
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	58,272,200.00	48,572,750.00	83.35
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	142,356,350.00	117,091,205.00	82.25
	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40,000,000.00	20,145,000.00	50.36
	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	178,117,250.00	125,792,053.00	70.62
	5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	86,825,893.00	47,977,679.00	55.26
	6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355,961,500.00	222,286,354.00	62.45
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,564,866,930.98	2,432,108,980.98	94.82
	1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	458,497,750.00	325,739,800.00	71.05
	2 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2,106,369,180.98	2,106,369,180.98	100.00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9,879,894,980.00	8,848,356,263.00	89.56
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,750,000.00	804,000.00	45.94
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,215,814,000.00	812,013,261.00	66.79
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8,662,330,980.00	8,035,539,002.00	92.76
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,645,277,713.00	1,107,009,655.00	41.85
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	613,818,452.98	503,370,155.00	82.01

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,210,584,260.02	502,764,500.00	41.53
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	820,875,000.00	100,875,000.00	12.29
	7	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00
	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		66,163,844,490.28	49,062,494,048.64	74.15
Indikator Program: Persentase Tersedianya Prasarana Perhubungan Darat yang Layak					
	1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1,011,315,955.00	415,014,955.00	41.04
	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1,011,315,955.00	415,014,955.00	41.04
	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	62,360,251,535.28	47,164,231,277.11	75.63
	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	14,621,693,479.28	13,444,761,584.75	91.95
	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupate/Kota	19,764,235,040.00	10,002,718,273.36	50.61
	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	885,790,000.00	148,198,650.00	16.73
	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	27,088,533,016.00	23,568,552,769.00	87.01
	3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	673,980,000.00	493,478,816.53	73.22
	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	380,000,000.00	278,998,816.53	73.42
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	293,980,000.00	214,480,000.00	72.96
	4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	61,950,000.00	49,950,000.00	80.63
	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	49,950,000.00	49,950,000.00	100.00
	2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12,000,000.00	-	0.00
	6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1,210,734,500.00	642,215,500.00	53.04
	1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1,006,944,500.00	624,780,500.00	62.05
	2	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	100,000,000.00	-	0.00
	3	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	30,290,000.00	17,435,000.00	57.56
	4	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	73,500,000.00	-	0.00

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
7	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	6,969,000.00	-	0.00
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	6,969,000.00	-	0.00
8	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	738,643,500.00	297,603,500.00	40.29
1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	418,687,000.00	94,217,000.00	22.50
2	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	319,956,500.00	203,386,500.00	63.57
9	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00	-	0.00
1	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	100,000,000.00	-	0.00

Sumber data : SPJ Fungsional Dishub, 2025

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perhubungan Kota Dumai. LKIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Dilain pihak, LKIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025 disusun berdasarkan Perubahan RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021-2026 dengan kesesuaian Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, Dokumen RKPD Tahun 2025, Capaian IKU Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025, Perjanjian Kinerja 2025 beserta Perubahannya.

Dalam laporan ini mengukur Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai yang terdiri atas 4 Kinerja Utama dengan 1 Indikator Kinerja Sasaran dengan hasil sebagai berikut:

1. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Prasarana Transportasi tingkat efisiensinya adalah 1,40 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2025 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2025 (71,28%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori Sangat Efisien;
2. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang adalah 0,86 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2025 (69%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2025 (80,63%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori Efisien;
3. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat efisiensinya adalah 1,98 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2025 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2025 (50,61%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori Sangat Efisien;

4. Pada Indikator Kinerja Utama Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan tingkat efisiensinya adalah 1.58 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2025 (98%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (62,05%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori Sangat Efisien;

B. LANGKAH PERBAIKAN / SARAN

1. Dinas Perhubungan Kota Dumai telah merencanakan Pembangunan Prasarana Transportasi yang telah tertuang didalam dokumen Perubahan Rencana Strategis 2021-2026 yang diharapkan dapat terealisasi;
2. UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor akan lebih meningkatkan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor serta mensosialisasikan pentingnya pengujian dan memastikan kelaian jalan kendaraan bagi masyarakat pengguna jalan;
3. Memprioritaskan penyediaan perlengkapan jalan di daerah yang belum tersentuh infrastruktur perhubungan;
4. Memberikan saran dan masukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai terkait peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik haruslah sejalan dengan pertumbuhan kendaraan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Demikian beberapa hal yang dapat Kami sampaikan dalam LKIP Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025 semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Dumai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas dalam-sama membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dumai, 12 Januari 2026
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

SAID EFFENDI, SE., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19800201 200604 1 013

LAMPIRAN LKIP 2025

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI
TAHUN 2021-2026**

Visi : Tenwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)
Misi : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas
Sasaran : Meningkatkan Infrastruktur Kota

Urutan	Indikator	Formula Perhitungan	Tetapan							Urutan	Indikator	Formula Perhitungan	Sasaran							Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran			
			Kondisi Awal		Target								Kondisi Awal		Target					Strategi	Kebijakan	Program	Ket
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021				2022	2023	2024	2025	2026						
Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah sarana dan prasarana pada tahun n dibagi Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang seharusnya tersedia dikali 100%	-	-	60	65	70	75	80	Terlewatnya Laju dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah sarana dan prasarana pada tahun n dibagi Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang seharusnya tersedia dikali 100%	-	-	50%	-	-	-	-	Penyediaan, Pemeliharaan/Perbaikan, Peningkatan kualitas infrastruktur bidang Perhubungan	Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pemetaan infrastruktur bidang perhubungan;	Program Penyelenggaraan Laju Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
											Persentase Transportasi	Jumlah transportasi transportasi pada tahun n / Jumlah transportasi transportasi yang seharusnya tersedia x 100%	-	-	-	55%	57%	70%	59%				
											Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Jumlah angkutan umum yang memiliki kIR pada tahun n / Jumlah angkutan umum pada tahun n dikali 100%	-	-	50%	-	-	-	-				
											Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum dan Barang	Jumlah angkutan umum dan barang yang memiliki kIR pada tahun n / Jumlah angkutan umum dan barang pada tahun n x 100%	-	-	61%	60%	75%	62%					
											Persentase Penyediaan Perangkoan Jalan	Jumlah perangkoan jalan yang tersedia pada tahun n / Jumlah perangkoan jalan yang seharusnya tersedia x 100%	-	-	55	-	-	-	-				
											Persentase Pembangunan Prasarana Jalan	Jumlah prasarana jalan yang dibangun pada tahun n / Jumlah prasarana yang seharusnya dibangun x 100%	-	-	40	-	-	-	-				
											Persentase Penyediaan Laju Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah perangkoan jalan yang tersedia pada tahun n / Jumlah perangkoan jalan yang seharusnya tersedia x 100%	-	-	60%	70%	75%	60%					
											Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	Jumlah kendaraan / panjang jalan	-	-	57%	-	-	-	-				
											Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	Panjang jalan : Jumlah kendaraan	-	-	-	1.198,23: 90.081	1.198,23: 94.117	1.198,23: 96.424	1.198,23: 102.873				

Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai

SAID EFFENDI SE. M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19800201 200604 1 013

RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan
				2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	%	76,5
		Persentase Prasarana Transportasi	%	78
		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum dan Barang	%	75
		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	%	75
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	km/unit	1.198,23 : 98.424

Dumai, Januari 2025



Pihak Pertama
KEPALA,

SAID EFFENDI, SE., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19800201 200604 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAID EFFENDI, SE., M.M

Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. PAISAL, SKM., MARS

Jabatan : WALIKOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Dumai, Februari 2025

PIHAK KEDUA
WALIKOTA

H. PAISAL, SKM., MARS

PIHAK PERTAMA
KEPALA

SAID EFFENDI, SE., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19800201 200604 1 013

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI
TAHUN 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	76,5%
		Persentase Prasarana Transportasi	78%
		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	75%
		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	75%
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	1.198,23 : 98.424
2	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP	BB

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	31,048,492,790
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp.	43,711,957,766
Jumlah	Rp.	74,760,450,556

Dumai, Februari 2025

Pihak Kedua
WALIKOTA DUMAI


H. PAISAL, SKM., MARS

Pihak Pertama
KEPALA


SAID EFFENDI, SE., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19800201 200604 1 013

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAID EFFENDI, SE., M.M

Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. PAISAL, SKM., MARS

Jabatan : WALIKOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Demi Allah, Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab **Pihak Pertama** dan bersedia mundur dari jabatan sebagai konsekuensi dari kegagalan pencapaian target kinerja.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Dumai, 26 September 2025



PIHAK KEDUA,

H. PAISAL, SKM., MARS



PIHAK PERTAMA,

SAID EFFENDI, SE., M.M
NIP. 19800201 200604 1 013

LAMPIRAN

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	76,5%
		Persentase Prasarana Transportasi	78%
		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	75%
		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	75%
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	1.198,23 : 98.424

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Rp 30.876.135.616,98	-
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 66.163.844.490,28	-

Dumai, 26 September 2025



PIHAK KEDUA,

H. PAISAL, SKM., MARS



PIHAK PERTAMA,

SAID EFFENDI, SE., M.M
NIP. 198002012006041013

PENGUKURAN KINERJA

Nama OPD : Dinas Perhubungan Kota Dumai
 Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	-	76,5%	76,5%	100%
		Persentase Prasarana Transportasi	$\frac{\text{Jumlah prasarana transportasi pada tahun } n}{\text{Jumlah prasarana transportasi yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$	78%	78%	100%
		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	$\frac{\text{Jumlah angkutan umum dan barang yang memiliki Kir pada tahun } n}{\text{Jumlah angkutan umum dan barang pada tahun } n} \times 100\%$	75%	52%	69%
		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	$\frac{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia pada Tahun } n}{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$	75%	75%	100%
		Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	<i>Panjang Jalan : Jumlah Kendaraan</i>	1.198,23 km : 94.424 unit	1.198,23 km : 97.239 unit	98%

Pagu Anggaran Program Tahun 2025 : Rp 99.924.976.667,26
 Realisasi Anggaran Program Tahun 2025 : Rp 77.100.488.677,62
 Persentase Capaian Program Tahun 2025 : Rp 77,16%

Dumai, 12 Januari 2026
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI



SAID EFFENDI, SE., M.M
 Pembina Tk. I
 NIP. 19800201 200604 1 013

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN REALISASI BELANJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI
TAHUN 2025**

BIDANG URUSAN	OPD PENGAMPU	URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN		TARGET KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PER MASALAHAN	UPAYA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN
Perhubungan	Dinas Perhubungan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33,761,132,176.98	28,037,994,628.98	83.05		
			Indikator Program: Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan					
		1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17,700,000.00	13,890,000.00	78.47		
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,680,000.00	5,280,000.00	68.75	Tunda Bayar	Menunggu Reviu Inspektorat Hasil oleh
			2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,190,000.00	3,780,000.00	72.83	Tunda Bayar	Menunggu Reviu Inspektorat Hasil oleh
			3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,830,000.00	4,830,000.00	100.00		
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17,784,359,360.00	15,047,264,689.00	84.61		
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17,745,705,360.00	15,013,110,689.00	84.60		
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14,000,000	14,000,000.00	100.00		
			3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24,654,000	20,154,000.00	81.75		
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	861,533,193.00	581,865,041.00	67.54		
			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	58,272,200.00	48,572,750.00	83.35		
			2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	142,356,350.00	117,091,205.00	82.25		

BIDANG URUSAN	OPD PENGAMPU	URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN		TARGET KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PER MASALAHAN	UPAYA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN	
			3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40,000,000.00	20,145,000.00	50.36		
			4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	178,117,250.00	125,792,053.00	70.62		
			5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	86,825,893.00	47,977,679.00	55.26		
			6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355,961,500.00	222,286,354.00	62.45		
			4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,564,866,930.98	2,432,108,980.98	94.82		
			1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	458,497,750.00	325,739,800.00	71.05	Tunda Bayar	Menunggu Hasil Reviu Inspektorat
			2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2,106,369,180.98	2,106,369,180.98	100.00		
			5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9,879,894,980.00	8,848,356,263.00	89.56		
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,750,000.00	804,000.00	45.94	Tunda Bayar	Menunggu Hasil Reviu Inspektorat
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,215,814,000.00	812,013,261.00	66.79	Tunda Bayar	Menunggu Hasil Reviu Inspektorat
			3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8,662,330,980.00	8,035,539,002.00	92.76	Tunda Bayar	Menunggu Hasil Reviu Inspektorat
			6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,645,277,713.00	1,107,009,655.00	41.85		
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	613,818,452.98	503,370,155.00	82.01	Tunda Bayar	Menunggu Hasil Reviu Inspektorat
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,210,584,260.02	502,764,500.00	41.53	Tunda Bayar	Menunggu Hasil Reviu Inspektorat
			3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	820,875,000.00	100,875,000.00	12.29	Tunda Bayar	Menunggu Hasil Reviu Inspektorat
			7	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00		

BIDANG URUSAN	OPD PENGAMPU	URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN		TARGET KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PER MASALAHAN	UPAYA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN	
		1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00			
		2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	66,163,844,490.28	49,062,494,048.64	74.15			
			Indikator Program: Persentase Tersedianya Prasarana Perhubungan Darat yang Layak						
		1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1,011,315,955.00	415,014,955.00	41.04			
		1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1,011,315,955.00	415,014,955.00	41.04	Tunda Bayar	Menunggu Reviu Inspektorat	Hasil oleh
		2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	62,360,251,535.28	47,164,231,277.11	75.63			
		1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	14,621,693,479.28	13,444,761,584.75	91.95	Tunda Bayar	Menunggu Reviu Inspektorat	Hasil oleh
		2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupate/Kota	19,764,235,040.00	10,002,718,273.36	50.61	Tunda Bayar	Menunggu Reviu Inspektorat	Hasil oleh
		3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	885,790,000.00	148,198,650.00	16.73	Tunda Bayar	Menunggu Reviu Inspektorat	Hasil oleh
		4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	27,088,533,016.00	23,568,552,769.00	87.01	Tunda Bayar	Menunggu Reviu Inspektorat	Hasil oleh
		3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	673,980,000.00	493,478,816.53	73.22			
		1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	380,000,000.00	278,998,816.53	73.42	Tunda Bayar	Menunggu Reviu Inspektorat	Hasil oleh
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	293,980,000.00	214,480,000.00	72.96	Tunda Bayar	Menunggu Reviu Inspektorat	Hasil oleh

BIDANG URUSAN	OPD PENGAMPU	URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN		TARGET KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PER MASALAHAN	UPAYA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN	
		4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	61,950,000.00	49,950,000.00	80.63			
		1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	49,950,000.00	49,950,000.00	100.00	Tunda Bayar	Menunggu Reviu Inspektorat	Hasil oleh
		2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12,000,000.00	-	0.00	Tunda Bayar	Menunggu Reviu Inspektorat	Hasil oleh
		6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1,210,734,500.00	642,215,500.00	53.04			
		1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1,006,944,500.00	624,780,500.00	62.05	Tunda Bayar	Menunggu Reviu Inspektorat	Hasil oleh
		2	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	100,000,000.00	-	0.00	Tunda Bayar	Menunggu Reviu Inspektorat	Hasil oleh
		3	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	30,290,000.00	17,435,000.00	57.56	Tunda Bayar	Menunggu Reviu Inspektorat	Hasil oleh
		4	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	73,500,000.00	-	0.00	Tunda Bayar	Menunggu Reviu Inspektorat	Hasil oleh
		7	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	6,969,000.00	-	0.00	Tunda Bayar	Sudah dimasukkan kedalam rekapan Tunda Bayar	
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	6,969,000.00	-	0.00			
		8	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	738,643,500.00	297,603,500.00	40.29			
		1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	418,687,000.00	94,217,000.00	22.50	Tunda Bayar	Menunggu Reviu Inspektorat	Hasil oleh

BIDANG URUSAN	OPD PENGAMPU	URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN			TARGET KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PER MASALAHAN	UPAYA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN	
			2	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	319,956,500.00	203,386,500.00	63.57	Tunda Bayar	Menunggu Reviu Inspektorat	Hasil oleh
			9	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00	-	0.00			
			1	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	100,000,000.00	-	0.00	Tunda Bayar	Menunggu Reviu Inspektorat	Hasil oleh



Dumai, 12 Januari 2026
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

SAID EFFENDI, SE., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19800201 200604 1 013